

Pengembangan Inisiatif Lokal untuk Sistem Perencanaan dan Anggaran Publik Berdasarkan SPKD

Temuan, pandangan dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh masing-masing individu dan tidak berhubungan atau mewakili Lembaga Penelitian SMERU maupun lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan SMERU.
Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi kami di nomor telepon: 62-21-31936336; Faks: 62-21-31930850; E-mail: smeru@smeru.or.id; Web: www.smeru.or.id

Lembaga Penelitian SMERU

Kerja sama Lembaga Penelitian
SMERU, KIKIS Jakarta, dan
PIAR NTT

Kupang, Desember 2004

Lokakarya

**Pengembangan Inisiatif Lokal untuk Sistem Perencanaan
dan Anggaran Publik Berdasarkan SPKD**

Kupang, 14-16 Oktober 2004

Kerja sama:

Lembaga Penelitian SMERU, KIKIS Jakarta, dan PIAR NTT

Lembaga Penelitian SMERU

Juli 2005

Lembaga Penelitian SMERU.

Pengembangan inisiatif lokal untuk sistem perencanaan dan anggaran publik berdasarkan SPKD/Lembaga Penelitian SMERU. -- Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2005. --

IV, 67 hal. ; 31 cm

ISBN 979-3872-11-X

- i. Judul
- ii. Akutansi publik
- iii. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

657.61/DDC 21

KATA PENGANTAR

SMERU bersama Kelompok Kerja Indonesia untuk Kemiskinan Struktural (KIKIS) dan Perkumpulan Pengembangan dan Advokasi Rakyat (PIAR) kali ini menyelenggarakan lokakarya regional dengan topik “Pengembangan Inisiatif Lokal untuk Sistem Perencanaan dan Anggaran Publik Berdasarkan SPKD” pada tanggal 14–16 Oktober 2004 di Kupang.

Topik lokakarya dipilih atas inisiatif PIAR berdasarkan kebutuhan organisasi nonpemerintah (ornop) NTT untuk saling berdiskusi dengan pihak eksekutif Pemda dan anggota Parlemen NTT tentang masalah kemiskinan dan penanggulangannya. Menurut PIAR, program-program penanggulangan kemiskinan belum menyentuh hak-hak dasar kelompok miskin secara langsung. Dari 16 kabupaten/kota di NTT, hanya satu kabupaten yang telah menyusun SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah), yaitu Kabupaten Alor. Kabupaten/kota lainnya belum menyusun SPKD dengan alasan belum mempunyai anggaran.

Hingga saat ini masalah kemiskinan masih ditangani secara terpusat dan dikelola melalui proyek-proyek sehingga mematikan inisiatif lokal. Akibatnya si miskin masih tetap menjadi obyek bukan subyek. Pola kebijakan penanggulangan kemiskinan seperti ini tidak berkelanjutan, tidak mempunyai karakter penguatan lokal dan tidak mengatasi masalah-masalah kemiskinan yang multidimensi. Dengan demikian, proses Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK) yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil menjadi penting dan sangat diperlukan agar penanggulangan kemiskinan benar-benar berpihak kepada masyarakat miskin.

SMERU dan KIKIS sependapat bahwa dokumen SPK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota hanya akan menjadi strategis bila didasarkan pada suara dan kepentingan masyarakat miskin serta memiliki keterkaitan dengan sistem anggaran dan perencanaan publik. Bila hal ini terpenuhi maka proses adaptasi dan/atau akomodasi SPK terhadap sistem perencanaan pembangunan dan APBD akan dapat diwujudkan.

Sebenarnya sejak tahun 2002 proses penyusunan SPK telah banyak dilakukan, baik di tingkat nasional, regional maupun provinsi. Namun proses adaptasi dan akomodasi dokumen SPK dengan sistem perencanaan dan anggaran publik belum banyak diperhatikan. KIKIS dan SMERU berinisiatif untuk mengembangkan suatu model sistem perencanaan dan anggaran publik berbasis SPK daerah yang benar secara hukum, dapat dipertanggungjawabkan pada publik, transparan, terbuka untuk pengembangan kapasitas partisipasi masyarakat, dan dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi.

Lokakarya ini diselenggarakan sebagai proses untuk menghimpun kembali hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya, misalnya pembuatan SPKD provinsi, peningkatan kapasitas ornop di NTT, mensistematisasi proses formulasi dokumen SPK, sehingga akhirnya dapat digunakan sebagai model inisiatif sistem perencanaan dan anggaran public yang memihak pada si miskin (*pro poor policy* dan *pro poor budget*). Sudah

waktunya masyarakat di NTT memiliki suatu model sistem perencanaan dan anggaran publik yang berpihak pada masyarakat miskin yang dapat diaplikasikan untuk daerah-daerah kota/kabupaten.

Tujuan lokakarya ini adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pengembangan inisiatif lokal untuk pengembangan sistem perencanaan dan anggaran publik berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin;
2. Mengembangkan model sistem perencanaan dan anggaran publik untuk konteks wilayah Provinsi NTT; dan
3. Memfasilitasi proses pengembangan kapasitas masyarakat sipil di wilayah Provinsi NTT agar mereka terlibat secara kritis dalam formulasi perencanaan kebijakan dan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin

Lokakarya ini diisi dengan diskusi pleno, latihan dan diskusi kelompok yang difasilitasi oleh KIKIS, PIAR dan SMERU. Narasumber yang diundang dari NTT adalah Gubernur NTT, Bp. Piet Talo, Ibu Salmiati Kaunang (KPKD NTT), Bp. Charisal A. Manu (Kepala BPS Kabupaten Alor) serta lima orang narasumber dari Jakarta, yaitu Ibu Binny Buchori (INFID), Bp. Iing Mursalin (BAPPENAS), Bp. Sulton Mawardi (SMERU) serta Bp. Andik Haryanto dan Bp. Supartono (KIKIS).

Peserta lokakarya berjumlah kurang lebih 40 orang, terdiri dari kalangan Ornop NTT, staf Pemda dari Kabupaten Belu, Alor, Rote, TTS, TTU, dan Kota Kupang, anggota DPRD dari Kota Kupang, Kabupaten Belu, dan TTS.

SMERU berharap melalui lokakarya ini hubungan antara Ornop, Pemda dan DPRD menjadi semakin bersinergi dan meningkatkan proses pengembangan kapasitas masyarakat sipil di NTT sehingga dapat terlibat secara kritis dalam pembentukan perencanaan kebijakan dan anggaran yang berpihak pada orang miskin, serta model sistem perencanaan dan anggaran publik yang dikembangkan dapat digunakan di daerahnya masing-masing.

Selamat Bekerja.

Jakarta, Oktober 2004

Hariyanti Sadaly

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
JADWAL LOKAKARYA	iv
PESERTA LOKAKARYA	v
HARI PERTAMA	1
SESI PERTAMA	2
▪ Pembukaan	2
▪ Testimoni dan Dialog mengenai Pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Basis	3
▪ Negara, Utang, dan Kemiskinan Global	15
SESI KEDUA	23
▪ Analisis Anggaran Kabupaten Kupang	23
HARI KEDUA	27
SESI PERTAMA	28
▪ Tanggung Jawab PEMDA dan Posisi SPKD dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional	28
▪ SPKD Provinsi NTT, Partisipasi Orang Miskin, Agendanya dan Bagaimana Menjalankannya	50
▪ Membangun Kebersamaan dalam Rangka Penyusunan Dokumen Stragegi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	51
▪ SPKD: Posisi dan Nilai Strategisnya bagi Pembangunan Berbasis Hak-hak Si Miskin	55
SESI DUA	58
▪ Kerangka Konseptual yang Memihak Orang Miskin	58
SESI TIGA	70
▪ Diskusi Kelompok: Mengembangkan Model Sistem Perencanaan Anggaran	70
HARI KETIGA	76
▪ Diskusi Kelompok: Rencana Tindak Lanjut (RTL)	77
LAMPIRAN	85
▪ Daftar Nama dan Alamat Peserta Lokakarya	86

JADWAL LOKAKARYA

Kamis – Sabtu, 14-16 Oktober 2004

Hari Pertama : Kamis, 14 Oktober 2004

13.00 – 15.00	Registrasi Peserta	Panitia
16.00 – 16.30	Istirahat Minum	
16.30 – 17.00	Pembukaan	Lery Mboiek (Direktur PIAR)
17.00 – 17.30	Penjelas Proses Lokakarya	
17.30 – 19.30	<ul style="list-style-type: none"> • Testimoni dan Dialog Mengenai Pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Basis • Negara, Hutang dan Kemiskinan Global 	Piet Talo, Gubernur NTT Binni Buchori, Sekjen INFID
19.30 – 20.30	Makan Malam	
20.30 – 21.30	• Analisis Anggaran Kab. Kupang	Jeheskial Beis - Adi Nange

Hari Kedua : Jumat, 15 Oktober 2004

07.00 – 08.00	Makan Pagi	
08.00 – 10.00	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggung Jawab PEMDA dan Posisi SPKD dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional • SPKD Prop. NTT, Partisipasi Orang Miskin, Agendanya dan Bagaimana Menjalankannya • Membangun Kebersamaan dalam Rangka Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) • SPKD Daerah: Posisi dan Nilai Strategisnya bagi Pembangunan Berbasis Hak-hak Si Miskin 	Iing Mursalin – BAPPENAS Salmiati Kaunang, KPKD NTT Charisal Matsen A. Manu, BPS Kab. Alor Andik Hardiyanto – KIKIS
10.00 – 10.30	Istirahat Minum	
10.30 – 12.30	Kerangka Konseptual yang Memihak Orang Miskin	Sulton Mawardi – SMERU
12.30 – 16.00	Istirahat Minum	
16.00 – 19.00	• Diskusi Kelompok: Mengembangkan Model Sistem Perencanaan Anggaran Publik untuk Konteks NTT	Tono dan Simson
19.00 – 20.00	Istirahat dan Makan Malam	
20.00 – 22.00	Diskusi Lanjutan	Tono dan Simson

Hari Ketiga: Sabtu, 16 Oktober 2004

07.00 – 08.00	Makan Pagi	
08.00 – 10.00	Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Simson Yacob
10.30 – 11.00	Istirahat Minum	
11.00 – 13.00	RTL dan Penutupan	Tono dan Simson

PESERTA LOKAKARYA

No	Nama	Asal
1	Andik Hardiyanto	KIKIS
2	Binny Buchori	INFID
3	Nuning Akhmadi	SMERU
4	Iing Mursalin	Bappenas
5	Donald Ishak	Bappeda Provinsi NTT
6	Ida	Kota Kupang
7	Remigius Halek	Bagian Ekonomi-Sekda Belu
8	Yustina	Bappeda Belu
9	Ana Tiwu	DPRD Kab Belu
10	Yasinta	Sanlima Kupang
11	Bonefasius Asa	BPMD Kab. Belu
12	Charisal A. Manu	BPS Kab. Alor
13	Maxi Tanesib	Bappeda TTU
14	Daniel Hurek	DPRD Kota Kupang
15	Albert Oliver	DPRD Kota Kupang
16	Mikhael Oben	Dinas sosial Kota Kupang
17	Yohanes Ghewa	Increase
18	Mekdi	Increase
19	Ferdinan Bano	WVI Kupang
20	Daniel Pobas	Bagian Ekonomi Sekda TTS
21	Jeheskial Beis	Amarasi
22	Yupensia	YTB
23	Immanuel Hakh	Kab. Rote
24	Christian Pay	DPRD TTS
25	Iswardi Lay	Kab. Rote
26	Yohanes Ndolu	WVI Rote
27	Haryanti Sadaly	SMERU
28	Mardiani	SMERU
29	Sulton Mawardi	SMERU
30	Simson Jacob	Kupang

HARI PERTAMA

SESI PERTAMA

Pembukaan

Lery Mboeik, Direktur PIAR

Testimoni dan Dialog mengenai Pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Basis

Piet Talo, Gubernur NTT

Negara, Utang, dan Kemiskinan Global

Binny Buchori, Sekjen INFID

SESI KEDUA

Analisis Anggaran Kabupaten Kupang

Jeheskial Beis dan Andi Nange

SESI PERTAMA

Pembicara	Ir. Sarah Lery Mboeik
Topik	Pembukaan
Moderator	Simson Jacob

Ir. Sarah Lery Mboeik adalah Direktur Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) yang berkedudukan di Kupang.

Lokakarya ini bertolak dari kemelut kemiskinan yang dihadapi sebagian masyarakat NTT. Menurut data statistik, jumlah orang miskin di NTT dari hari ke hari menurun, tapi derajat kemiskinan justru semakin meningkat, karena program penanggulangan kemiskinan tidak menyentuh langsung hak-hak dasar kelompok miskin. Khusus di tingkat Provinsi NTT, banyak pihak telah menerapkan strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD), namun dari 16 kab/kota di NTT, baru Kabupaten Alor yang menyusun SPKD. Alasan klasik dari daerah lain adalah karena belum adanya anggaran.

Kebijakan anggaran menjadi faktor penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara nasional. Khusus untuk kota (Kota Kupang), sebuah contoh yang bersifat kontraproduktif dengan upaya penanggulangan kemiskinan adalah munculnya beberapa peraturan daerah (perda) yang justru membuat para pedagang kaki lima semakin termarginalisasi. Tidak hanya itu, banyak refleksi pengalaman yang bisa menjadi bahan kajian terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

Kegiatan ini dilaksanakan atas kerja sama antara PIAR, KIKIS dan SMERU, dan *stakeholder* lainnya dari eksekutif, seperti BAPPENAS/BAPPEDA dan dinas-dinas strategis lainnya dan juga legislatif. Diharapkan kegiatan ini nantinya dapat ditindaklanjuti di tingkat kabupaten dan kota.

Kita berharap lokakarya ini dapat menghasilkan konsep dan analisis bersama tentang penanggulangan kemiskinan yang sedang kita galakkan saat ini dan dapat diterapkan di daerah masing-masing. Kami juga mengharapkan munculnya pemikiran kritis yang menjadi kekuatan bagi kita untuk merencanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya proses ini akan difasilitasi oleh teman-teman dari Kupang dan Jakarta.

Pembicara	Drs. Piet Talo
Topik	Testimoni dan Dialog mengenai Pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Basis
Moderator	Simson Jacob, Andik Hardiyanto

Drs. Piet Talo adalah Gubernur NTT.

Pemaparan:

Pada kesempatan ini, kita patut bersyukur dapat berkumpul untuk melihat secara konseptual dan kritis-analitis atas persoalan-persoalan yang kita hadapi. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, di antaranya:

- Di NTT, kita belum menggunakan sumber daya kelautan yang sangat potensial.
- Janganlah kita bicara kemiskinan dengan referensi dari luar melainkan harus disesuaikan dengan kondisi lokal.
- Kita harus menghilangkan prasangka buruk, stereotip, dan sikap diskriminatif agar dapat menggalang kerja sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- Seringkali pejabat pemerintah kabupaten menjadi marah ketika muncul komentar bahwa angka kemiskinan di daerahnya sangat rendah.
- Peran pemerintah harus bersifat advokatif dan jangan hanya berorientasi pada proyek.
- Daya saing masyarakat harus terus dikembangkan untuk mengimbangi perkembangan jaman.
- Prinsip, proses dan dampak dari sebuah perubahan harus menjadi titik tolak dan perhatian dari semua pihak.
- Daya saing kita akan sangat baik jika didukung oleh SDM, akses ke luar dan modal sosial yang baik. Birokrasi turut berperan dalam upaya peningkatan daya saing.
- Upaya penegakan hukum harus menjadi perhatian karena salah satu penyebab kemiskinan adalah korupsi dan korupsi terus menjadi penghalang pembangunan karena lemahnya penegakan hukum.
- Pencatatan kekayaan para pejabat menjadi penting untuk memantau kegiatan korupsi. Pencatatan kekayaan ini telah dilakukan oleh sebagian besar pejabat di NTT.

Inilah beberapa hal praktis yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.

Bahan Presentasi:

**Strategi Pembangunan Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan
di Nusa Tenggara Timur**

Oleh:
Drs. Piet Talo
Gubernur Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur

Letak : 8 – 12 LS, 118 – 125 BT

Pulau : 566 pulau (4 pulau besar)

Pemerintahan : 14 Kabupaten, 1 Kota, 124 Kecamatan, 2516 Kelurahan/Desa

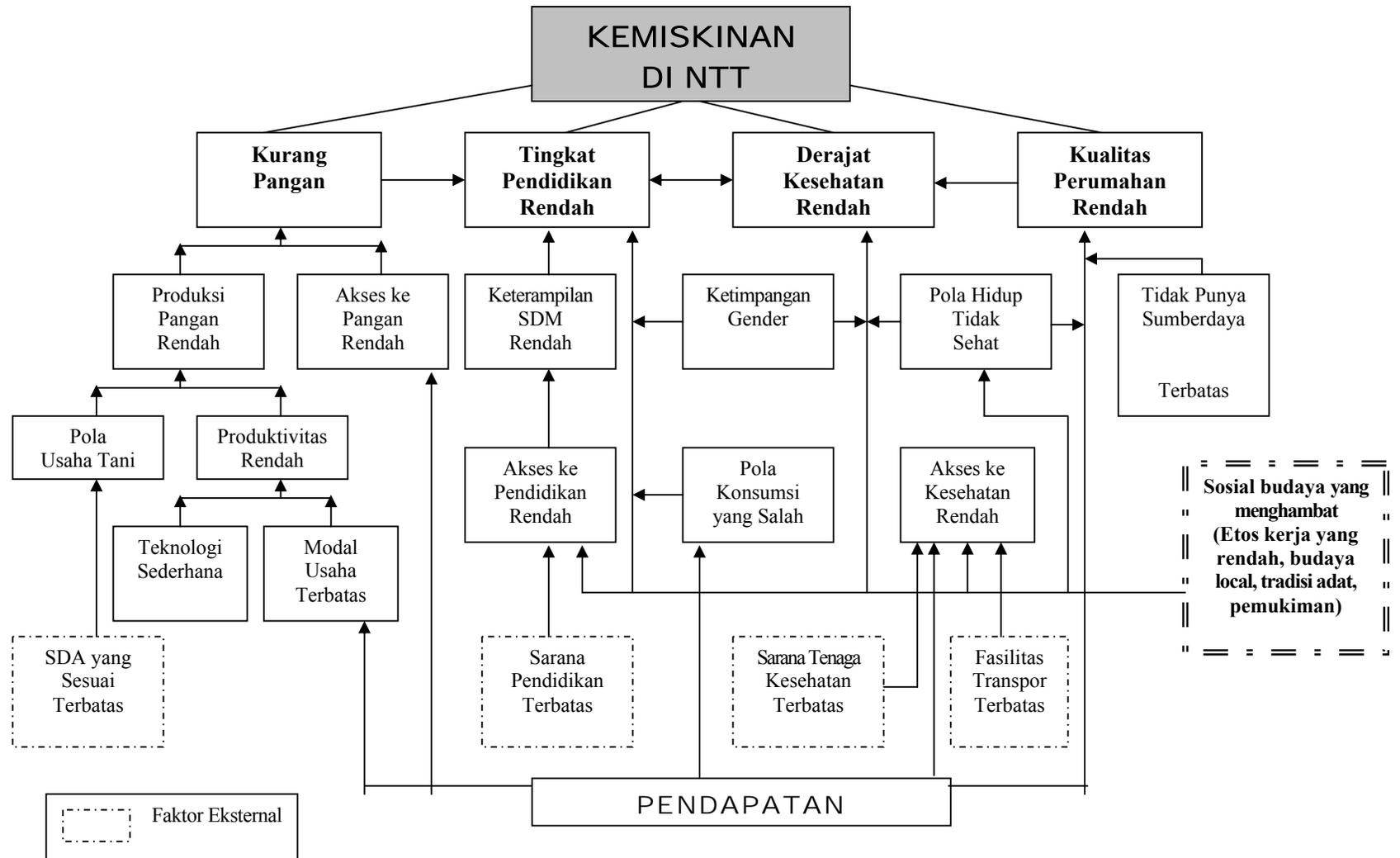
Luas Daratan : 47.349,9 km²

Penduduk : 3.924.871 jiwa (BPS, 2002)

Pendapatan per kapita :

Penduduk Miskin : 1,2 juta jiwa (30,74%)

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL PENYEBAB KEMISKINAN



Tiga Pilar Pemerataan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur adalah:

- Ekonomi
- Sumber daya manusia
- Hukum

Digerakkan oleh Tiga Faktor Dinamis, yaitu:

- Transformasi birokrasi
- Aksesibilitas
- Modal sosial

Menuju tercapainya tujuan, yaitu:

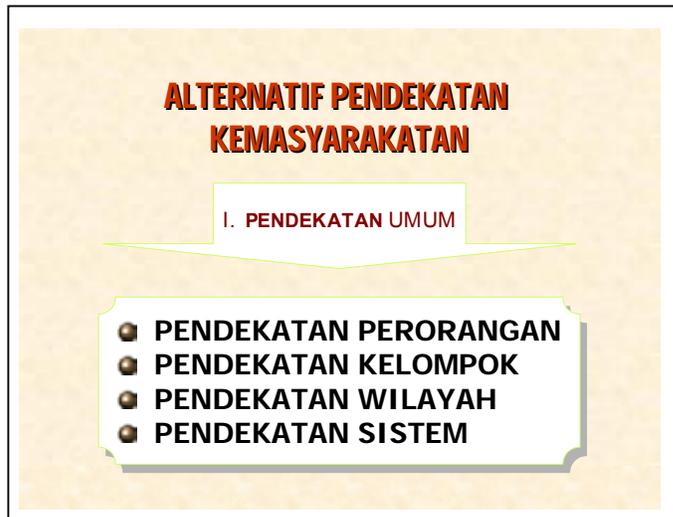
- Manusia yang berdaya saing tinggi;
- Pertumbuhan ekonomi yang tinggi;
- Rasa keadilan bagi rakyat NTT.

TIGA PILAR DENGAN TIGA FAKTOR DINAMIS DAN TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah periode waktu lima tahun ke depan (2004-2008), perlu dipertimbangkan program dan kegiatan yang menyebabkan terjadinya hubungan fungsi antara pilar pemerataan dengan faktor dinamisnya. Contoh:

- Hubungan fungsi antara bidang ekonomi, transformasi birokrasi dan aksesibilitas akan mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.
- Untuk mencapai manusia NTT yang berdaya saing tinggi perlu adanya hubungan fungsi antara SDM (DIKKES), aksesibilitas dan modal sosial.
- Hubungan fungsi antara hukum, transformasi birokrasi dan modal sosial akan mendukung tercapainya keadilan atau rasa adil bagi masyarakat.

Kesemua hasil yang dicapai akan mengantarkan masyarakat NTT keluar dari kemiskinan





Tren Perubahan

Makro-Global
 Menipisnya Batas Negara (*Borderless State*) karena kemajuan teknologi informasi dan kompetisi antar negara yang semakin tinggi karena globalisasi dan liberalisasi ekonomi.

Makro-Regional
 Berakhirnya kerja sama Indonesia – IMF yang berdampak pada mengecilnya aliran dana APBN ke daerah.

Geo-politik & Geo-strategis
NTT – Timor Leste – Australia dan Papua Nugini.
 Persoalan Wilayah Perbatasan → Bagaimana mendorong perubahan dari spektrum konflik ke spektrum pertumbuhan.

Tuntutan Internal

Pemecahan Masalah
Kemiskinan

Tugas Konstitusional Gubernur

Dalam konteks Perubahan yang terus berlangsung dan Tuntutan Internal yang muncul adalah:

**Menjaga keutuhan NKRI
&
Penanggulangan Kemiskinan**

Implikasi Perencanaan dari Tugas Konstitusional

Bagaimana mengembangkan strategi dan program secara tepat untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah.

Strategi

Pertumbuhan Melalui Pemerataan dgn Prinsip :
*“Membangun dari apa yang dimiliki
rakyat
& apa yang ada pada rakyat”*

Program 3 Pilar Utama & 3 Faktor Dinamis



- ## 1. Transformasi Birokrasi
- a. **Pembingkaian Pola Pikir (Reframing)**
 - b. **Restrukturisasi (Restructure)**
 - c. **Revitalisasi (Revitalisation)**
 - d. **Pembaharuan (Renewal)**
- 


2. Aksesibilitas



3. Modal Sosial

a. Pembangunan & Pemulihan Institusi Sosial

- ☞ Pranata keluarga,
- ☞ Pranata Adat/Budaya,
- ☞ Pranata Lingkungan,
- ☞ Pranata Agama,
- ☞ Pranata Ekonomi,
- ☞ Pranata Hukum,
- ☞ Pranata Lingkungan hidup.

b. Pengembangan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

- ☞ OMS Pendidikan,
- ☞ OMS Agama,
- ☞ OMS LSM,
- ☞ OMS Pemuda,
- ☞ OMS Perempuan,
- ☞ OMS Pers.

c. Pengembangan Ethos Kerja

ethos kerja keras, prestasi, hemat, menabung & mandiri

d. Pemberdayaan (partisipasi) masyarakat

- e. Membangun jaringan kerjasama antar lembaga Pemerintah, Agama & Sosial dalam rangka menyelesaikan konflik, menciptakan ketertiban dan keamanan

f. Pembinaan infrastruktur politik

Andik Hardiyanto (KIKIS)

Kebijakan pengelolaan anggaran (APBD) merupakan otoritas pemerintah. Meskipun demikian, dampak pengelolaan anggaran (alokasi) seyogyanya mampu melayani kebutuhan masyarakat.

Alokasi dan pengelolaan anggaran pembangunan daerah dalam APBD merupakan gambaran pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah harus mempunyai kemauan atau itikad untuk menyusun anggaran yang lebih berpihak pada kelompok miskin.

Beberapa kendala penyusunan dokumen SPKD di lapangan, di antaranya adalah minimnya tenaga pemerintah yang berkualitas dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Diskusi

Pertanyaan:

Yohanes – Increase

- Menyangkut transformasi birokrasi, pungli masih merupakan masalah yang menghambat upaya pembenahan birokrasi.
- Strategi atau langkah apa saja yang telah dilakukan untuk menuju transformasi birokrasi?

Jawab:

Gubernur NTT

Sekarang ini pemerintah telah berupaya menghapuskan berbagai pungli dan bahkan terbuka menerima kritikan dan masukan dari seluruh lapisan masyarakat berkaitan dengan pungli.

Pertanyaan:

Yohanes Ndolu – WVI Rote Ndao

Apakah Bapak sebagai pemimpin wilayah tertinggi telah menghimbau para bupati agar mengunjungi dan menyaksikan langsung kondisi masyarakat sebagaimana yang Bapak lakukan selama menjadi Bupati TTS.

Iswardi Lay – GMIT Ronda

Belum ada kejelasan tentang program riil yang disampaikan Bapak, karena itu perlu ada penjelasan tambahan.

Charisal A. Manu – BPS Alor

Perhatian pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan tampaknya belum serius dan ini terlihat dari alokasi APBN/APBD. Bagaimana tanggapan Bapak tentang minimnya alokasi anggaran untuk upaya ini?

Daniel Hurek – DPRD Kota

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah perlu menambah alokasi dana untuk kesehatan dan pendidikan.

Olivier Albert – DPRD Kota

- Kami minta sikap tegas Bapak menyangkut operasionalisasi Perda 10 Kota Kupang tentang retribusi dan rencana revisi perda tersebut sesuai dengan Kepmendagri.
- Ada kebijakan Kota Kupang yang disinyalir justru menghambat upaya penanggulangan kemiskinan. Karena itu, kami mengharapkan dukungan dari Bapak.

Jawab:

Gubernur

- Kita selalu memberikan himbauan dan dorongan (kunjungan langsung ke masyarakat, *ed.*) kepada para bupati, namun hal ini sangat tergantung pada komitmen pribadi. Hal yang paling penting adalah pengejawantahan sumpah jabatan. Karena bila melanggarnya, cepat atau lambat kita akan menerima hukumannya.
- Otonomi daerah tidak membuka peluang bagi provinsi untuk serta-merta campur tangan atas tugas kabupaten atau kota.
- Mengenai anggaran penanggulangan kemiskinan, pemerintah memang perlu memberikan perhatian yang lebih serius dengan menambah alokasi dananya agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan baik. Namun, hal ini tentunya sangat tergantung pada daerah masing-masing.
- Peningkatan sumber daya manusia (SDM) memang harus menjadi perhatian khusus dalam rangka peningkatan daya saing.

Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan.

Pembicara	Binny Buchori
Topik	Negara, Utang, dan Kemiskinan Global
Moderator	Simson Jacob

Binny Buchori adalah Sekjen INFID di Jakarta.

Pemaparan:

Kemiskinan selalu kait-mengait, dan tidak terjadi dalam ruang vakum atau berdiri sendiri. Beberapa kenyataan kemiskinan di Indonesia, antara lain: Jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 40 juta (sangat tinggi), jumlah penduduk miskin 100 juta.

Apa yang perlu kita cermati adalah apakah laporan yang dibuat eksekutif sesuai dengan kondisi di lapangan? Kita menyaksikan banyak aksi penggusuran besar-besaran di Indonesia. Unicef mensinyalir kehilangan generasi akibat banyaknya bayi yang lahir dalam kondisi kurang sehat dan kurang gizi. Ditambah pula tingginya jumlah anak putus sekolah yang kebanyakan di antaranya perempuan.

Saya ingin mengajak kita untuk melihat pendekatan-pendekatan pemerintah yang cenderung berorientasi proyek, seperti program Jaring Pengaman Sosial (JPS), program rehabilitasi gedung sekolah, dll. Di samping itu, pemerintah juga sudah memulai melaksanakan SPKD. Namun demikian, banyak kebijakan pembangunan dan ekonomi pemerintah yang tidak memihak kelompok miskin. Pemerintah Indonesia tidak mempunyai keleluasaan untuk membuat kebijakannya sendiri karena terikat dengan syarat-syarat dari lembaga-lembaga seperti IMF, Bank Dunia dan lain-lain.

Pada intinya berbagai program pemerintah sebenarnya gagal menyelesaikan persoalan ketersediaan lapangan kerja bagi kelompok miskin. Hal ini terkait dengan kondisi kemiskinan yang bersifat struktural. Penciptaan lapangan kerja dapat mengurangi masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan sangat berkaitan dengan kebijakan makro.

Dominasi negara donor atau kreditor terhadap pelaksanaan pembangunan di negara kita sangat besar, sehingga dapat dengan mudah mempengaruhi kebijakan. Ini bisa terjadi karena negara kita masih dililit utang yang sangat besar.

Dokumen SPKD harus menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Instrumen dari SPKD adalah APBD.

Akibat kesalahan pengelolaan utang oleh pemerintah, diperkirakan 50% dari *pendapatan negara* dipergunakan untuk membayar utang. Karena itu, anggaran pendidikan dan kesehatan semakin lama semakin kecil. Pada dasarnya pemerintah kita akan sangat sulit untuk mewujudkan pasal 31 UUD '45, akibat jumlah utang yang sangat besar.

Bahan Presentasi:

Negara, Utang, dan Kemiskinan Struktural

Oleh Binny Buchori
Disampaikan pada Lokakarya SPKD:
PIAR, SMERU, KIKIS, Kupang,
14 Oktober, 2004

2. Apa yang kita tahu tentang kemiskinan

- Jumlah penduduk miskin: 100 juta;
- Jumlah pengangguran: 40 juta orang;
- Pendapatan penduduk rata-rata Indonesia: US\$ 600, atau turun lebih dari 100% dibandingkan masa sebelum krisis ekonomi 1997 (US\$ 2000). Indonesia termasuk dalam kategori negara berpendapatan rendah;
- Indeks pembangunan manusia Indonesia secara global rendah: di bawah Vietnam;

3. Beberapa hal yang kita lihat tiap hari

- Bertambahnya sektor informal di kota-kota besar;
- Menaiknya TKI sebesar setidaknya 40% dari 2-3 juta (sebelum krisis, 1997) menjadi 5 juta;
- Meningkatnya penggusuran di kota-kota besar terutama untuk pembangunan mall;
- Menurunnya pelayanan kesehatan dengan akibat: terjadinya generasi yang hilang;
- Biaya pendidikan yang bertambah mahal dengan akibat meningkatnya jumlah anak putus sekolah (terutama perempuan);

4. Beberapa upaya penanggulangan kemiskinan

- Program pemerintah:
 - Membuat proyek-proyek: mengadakan beras murah, proyek JPS, proyek pendidikan (gerakan orang tua asuh); membuat proyek-proyek padat karya; IDT, dll
 - Membuat kebijakan melalui : Komisi Penanggulangan Kemiskinan, Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan:
- Negara donor, kreditor:
 - Mendanai dan merancang proyek : JPS, pendidikan dll;
 - Kebijakan: deregulasi agar aliran modal datang sehingga ada pendanaan untuk kemiskinan

5. Beberapa upaya penanggulangan kemiskinan

- Masyarakat sipil/ civil society (ORNOP dll):
 - Memantau pelaksanaan proyek
 - Ikut mengerjakan proyek
 - Advokasi di tingkat kebijakan
 - "Berdagang" proyek kemiskinan

6. Seberapa efektifkah proyek ini?

- JPS, padat karya, IDT, "Ayo Sekolah" menyelesaikan masalah secara sementara, masalah masa kini saja;
- Proyek tidak menjawab kenapa TKI meningkat, kenapa migrasi dari desa ke kota berjalan terus, kenapa orang selalu kehilangan lahan;
- Kemiskinan di Indonesia adalah masalah sistemik, dan struktural.

7. Kemiskinan struktural, kebijakan pembangunan dan ekonomi

- Kemiskinan struktural disebabkan oleh kebijakan pembangunan dan ekonomi yang tidak berpihak pada kaum miskin (pertumbuhan tanpa pemerataan);
- Meningkatnya TKI berkaitan dengan meningkatnya pengangguran yang disebabkan oleh: hilangnya pekerjaan di perdesaan, dan berkurangnya industri manufaktur karena relokasi dll;

8. Kemiskinan struktural, kebijakan pembangunan, dan ekonomi

- Naiknya ongkos pendidikan disebabkan anggaran pendidikan menciut;
- Naiknya pengangguran berkaitan dengan kebijakan privatisasi;
- Turunnya kualitas kesehatan disebabkan anggaran kesehatan yang terus menurun;
- Penggusuran terjadi karena prioritas peruntukan lahan bukan untuk pemukiman ataupun pertanian;
- Tingginya angka putus sekolah karena menurunnya daya beli masyarakat akibat krisis finansial.

9. Kebijakan Pembangunan dan Ekonomi: siapakah yang menentukan?

- Pemerintah Pusat mengeluarkan dan menentukan kebijakan pembangunan dan ekonomi: REPELITA dan sekarang Propenas;
- Pemerintah berkerja sama dengan negara-negara donor dan lembaga keuangan internasional yang tergabung dalam Consultative Group on Indonesia (CGI);

10. Kebijakan Pembangunan dan Ekonomi: siapakah yang menentukan?

- Selalu ada kompromi antara pemerintah pusat dengan negara donor, kreditor: kompromi sering mengabaikan kepentingan nasional; terutama setelah Indonesia mengambil program IMF (deregulasi, privatisasi, liberalisasi);
- Meski hanya berbentuk forum konsultasi, CGI sangat berpengaruh dalam penentuan prioritas pembangunan, contoh: perbandingan alokasi perbankan dengan pendidikan;

11. Kebijakan Pembangunan dan Ekonomi: siapa yang menentukan?

- Kerjasama ini penting karena pemerintah membutuhkan dana tambahan. Selama ini dana tambahan dalam bentuk hibah, bantuan teknis dan utang;
- Ironisnya: ketika Indonesia kaya karena harga minyak di tahun 70-an, kreditor selalu membujuk Indonesia untuk berutang;
- Akibat salah urus dan salah rancang Indonesia terjebak utang: US\$ 70 milyar

12. Utang dan kemiskinan

- Akibat utang: 50% dari pendapatan Indonesia (perdagangan, pajak, ekspor), digunakan untuk membayar bunga dan cicilannya;
- Setidaknya 30% dari APBN (2005) digunakan untuk membayar bunga dan cicilan;
- Anggaran pembangunan (pendidikan dan kesehatan) terus menurun karena alokasi anggaran lebih besar untuk membayar utang;

13. Utang dan kemiskinan

- Amanah UUD 1945: anggaran pendidikan harus 20% dari APBN tidak bisa dipenuhi apabila pembayaran utang terus dilakukan;
- Artinya: presiden RI mana pun juga pasti akan melanggar konstitusi untuk pasal 31 ini;
- Dominasi kreditor/donor menyebabkan Indonesia harus selalu mau membayar utang.

14. Beberapa kenyataan tentang utang

- Utang tidak selamanya efektif: studi UNSFIR 2004: 80% utang kembali digunakan untuk kepentingan kreditor (belanja barang, bantuan teknis);
- Proyek utang dan hibah sering salah rancangan, salah urus: Kedung Ombo, Koto Panjang, JPS dll;

15. Solusi Pemerintah terhadap utang

- Penjadwalan kembali : menunda pembayaran (melalui Paris Club, 1998, 2000, 2002): tidak menyelesaikan masalah;
- Mencari utang baru untuk membayar utang, melalui CGI;
- Menjual aset: melalui program privatisasi.

16. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

- Kemiskinan yang ada disebabkan adanya sebuah sistem perekonomian yang tidak adil;
 - Strategi penanggulangan kemiskinan harus mencerminkan cara-cara yang bisa mengatasi sebab terjadinya kemiskinan;
 - Fokus: kepada kebijakan yang koheren dan konsisten;
 - Kontradiksi antar perundangan harus dihindari (demi PAD, pengurusan dilakukan).
-

17. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

- Menyusun APBD yang berpihak pada kaum miskin;
 - Bersedia melakukan perubahan yang radikal: misalnya: reformasi birokrasi;
 - Negosiasi dengan pemerintah nasional agar aturan investasi dll ditujukan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat setempat;
 - Berhenti dengan pendekatan proyek
-

Diskusi

Pertanyaan/komentar:

Dan Hurek

Partai politik belum dapat menyediakan kader yang baik sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan belum optimal khususnya dalam penyusunan APBD.

Remigius Halek – Bagian Ekonomi Kabupaten Belu

- Selama ini pemerintah menerapkan dua sistem penyusunan APBD. Eksekutif memikirkan keuntungan, sedangkan legislatif menuntut adanya keseimbangan. Sekarang ini proses penyusunan APBD menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja.
- Apakah kemiskinan itu adalah sesuatu yang esensial atautkah hanya sebuah konsep?

Jawaban:

Binny Buchori

- Kita memiliki kesulitan untuk mengukur keberhasilan penanggulangan kemiskinan. Sebenarnya dengan otonomi daerah, kita memiliki peluang untuk melakukan upaya inovatif penanggulangan kemiskinan.
- Dalam pembangunan ekonomi kita masih menggunakan paradigma lama.
- Kalau kita berhasil membujuk Departemen Keuangan untuk melakukan pengalokasian anggaran yang *pro-poor*, maka tentunya akan mudah untuk menemukan solusi upaya penanggulangan kemiskinan.

Pertanyaan/komentar:

Simson Jacob

Apakah kebijakan yang diberikan kreditor adalah untuk membantu kita atau memberikan keuntungan kepada para kreditor?

Oliver Alberth

- Kami berharap agar forum ini dapat memberikan masukan yang berharga menyangkut konsep penanggulangan kemiskinan untuk diterapkan di Kota Kupang.
- Negosiasi dengan pemerintah pusat merupakan masalah tersendiri yang selalu dihadapi oleh pemerintah daerah.

Maxi Tanesib – Bappeda TTU

Dalam rangka peningkatan PAD kita dihadapkan dengan masalah kemiskinan.

Christian Pay – DPRD TTS

- LSM yang ada diharapkan selalu peka dengan masalah kemiskinan sehingga melahirkan konsep pemikiran dan bentuk-bentuk program penanggulangan kemiskinan. Dan setiap wakil daerah yang hadir dalam acara ini dapat menerapkan konsep tersebut di daerah masing-masing.
- LSM bisa membantu daerah mendatangkan investor.

Iswardi Lay

Persoalan kemiskinan merupakan masalah bersama, bukan hanya masalah LSM atau pemerintah.

Jawaban:

Binny Buchori

- Yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah penyebab kemiskinan. Kita pun harus secara jujur mengakui bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah masalah struktural.
- Kemiskinan bukan hanya disebabkan masalah kekurangan sumber daya tetapi lebih dari itu adalah adanya masalah struktural yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan.
- Banyak utang negara yang dikorupsi, dan juga sejumlah dana yang berasal dari utang itu hanya digunakan untuk belanja barang.
- Prasyarat untuk mendapat utang dari luar negeri juga merupakan penyebab terjadinya pengurangan dana untuk pembangunan.
- Pendanaan terbesar di negara kita berasal dari utang luar negeri.

SESI KEDUA

Pembicara	Jeheskial Beis dan Adi Nange
Topik	Analisis Anggaran Kabupaten Kupang
Moderator	Stef MM

Jeheskial Beis adalah wakil masyarakat Amarasi Timur yang akan memberikan kesaksian (testimoni) tentang anggaran Kabupaten Kupang. Adi Nange adalah staf PIAR yang akan membagi pengalamannya ketika mengadakan studi lapangan Anggaran Kabupaten Kupang.

Pemaparan:

Jeheskial Beis

- Kami sangat merasakan bahwa perencanaan anggaran dan implementasinya tidak berpihak pada rakyat. Hal ini kami alami di desa kami, dalam hal pengerjaan pasar dan pengerasan jalan. Kedua proyek tersebut tidak dikerjakan secara transparan, terkesan tumpang tindih dan tidak dilakukan sosialisasi. Kami sangat kecewa karena PPM tidak dikerjakan oleh masyarakat, tetapi oleh kontraktor.
- Proyek-proyek yang ada di desa terkesan tidak untuk membantu masyarakat.
- Proyek pengerasan jalan belum selesai dikerjakan, tetapi sudah masuk pada proyek pengerjaan pasar.
- Anggaran yang ada untuk pengerjaan kedua proyek tersebut juga sangat kabur dan tidak transparan.
- Masyarakat tidak dilibatkan dalam pengerjaan kedua proyek, walaupun keduanya merupakan proyek masyarakat.
- Mutu atau kualitas kedua proyek tidak sesuai dengan bestek yang ada.
- Kami sebagai masyarakat sangat kecewa karena proyek tersebut diserahkan kepada kontraktor dan juga proyek yang satu belum selesai namun sudah mulai mengerjakan proyek yang baru lagi.

Adi Nange

- Penelitian di Kab. Kupang ini merupakan rangkaian riset di Kecamatan Kupang Barat dan Kecamatan Nekamese.
- Minimnya akses masyarakat dalam proses penyusunan program pembangunan.
- Biasanya keterlibatan masyarakat hanya sampai pada tingkat musbangdus (musyawarah pembangunan dusun) atau musbangdes (musyawarah pembangunan desa). Ketika proses penyusunan ini sampai di tingkat kecamatan, keterlibatan masyarakat sudah terabaikan. Hal ini karena yang mengikuti proses pada tahap ini adalah para tokoh pemerintah desa. Anehnya, hasil dari proses di tingkat kecamatan sama sekali tak diketahui oleh masyarakat.
- PIAR mencoba menyimpulkan beberapa kenyataan di lapangan, di antaranya: sulitnya mengakses dokumen-dokumen publik dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap dokumen-dokumen publik.
- Masyarakat pada umumnya belum mengetahui informasi mengenai penyusunan anggaran dan besarnya anggaran yang akan dipergunakan untuk pembangunan.

- Masyarakat hanya mengetahui bahwa ada musbangdus dan musbangdes yang menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengusulkan program atau kegiatan.
- Pemerintah dan kalangan pers memiliki pandangan yang berbeda tentang informasi anggaran pembangunan. Pemerintah mengatakan bahwa mereka telah menginformasikan anggaran publik kepada masyarakat sedangkan kalangan pers merasa bahwa masih ada kesulitan untuk mengakses informasi tentang anggaran publik.
 - Masyarakat hanya terlibat pada tahap musbangdus dan musbangdes, ketika sampai pada tingkat kecamatan masyarakat tidak terlibat secara langsung karena yang terlibat hanya pemerintah desa.
 - Bappeda memiliki peran penting dalam proses perencanaan.
 - Pengalokasian anggaran masih dirasa sangat kecil oleh pemerintah desa dan masyarakatnya. Dana yang kecil tersebut juga diterima per triwulan dan pada triwulan pertama belum bisa diterima.
 - Dana Alokasi Umum (DAU) yang dimiliki oleh Kabupaten Kupang pada 2003 sebesar 186 miliar rupiah dan 80% digunakan untuk dana rutin dan 20% untuk dana pembangunan.
 - Soal pengawasan, kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan dirasa masih belum memadai. Pengawasan hanya dilakukan oleh pemerintah desa.
 - Kendala-kendala teknis: keengganan kepala daerah untuk diwawancarai, sulitnya mendapatkan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran dan kurangnya informasi kepada masyarakat dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran.

Diskusi

Pertanyaan/komentar:

Albert Oliver

Saya mencermati dua hal penting, yaitu:

1. Proses penyusunan program pembangunan yang tidak berkesinambungan.
2. Lemahnya akses informasi masyarakat terhadap proses penyusunan program.

Michael Oben – Dinsos Kota

Kita harus memikirkan kembali strategi penyusunan program pembangunan.

Rofinus

Bappeda berperan penting dalam penyusunan program pembangunan. Perencanaan pembangunan idealnya harus dimulai dari desa. Karena itu, musbangdes untuk 2004 ini masih bersifat transisi dan baru akan efektif pada 2005. Selama ini, banyak program pembangunan cenderung tidak kena sasaran, karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Charisal A. Manu

Pada masa lalu, masyarakat belum menaruh perhatian pada kebijakan pembangunan. Tetapi, sekarang ini masyarakat sudah sangat cerdas karena itu mereka juga ingin tahu, apa saja yang akan dilakukan pemerintah untuk pembangunan di daerahnya.

Jawaban:**Jeheskial Beis**

Apa yang dibutuhkan masyarakat adalah keterbukaan dalam proses perencanaan pembangunan di daerah. Masyarakat kurang berpartisipasi sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan. Sangat memprihatinkan banyak program pembangunan lebih berorientasi proyek.

Adi Nange

- Kondisi ini adalah fakta yang kami alami. Hal ini menyangkut kurangnya respon pemerintah terhadap kegiatan penelitian kami pada saat itu.
- Sebenarnya dalam proses penyusunan program pembangunan, tahapan-tahapan tersebut sudah dilalui. Namun, yang menjadi soal adalah ketidaktahuan tentang skala prioritas dalam pembangunan di daerahnya saat kegiatan musbangdus atau pun musbangdes. Intinya, kurangnya informasi yang didapat masyarakat.

Jeheskial Beis

Kami sebagai masyarakat mengharapkan agar setiap proyek yang ada benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan perlu melibatkan masyarakat.

HARI KEDUA

SESI PERTAMA

Tanggung Jawab PEMDA dan Posisi SPKD dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional

Ir. Iing Mursalin, Bappenas

SPKD Provinsi NTT, Partisipasi Orang Miskin, Agendanya dan Bagaimana Menjalankannya

Salmiati Kaunang, KPKD NTT

Membangun Kebersamaan dalam Rangka Penyusunan Dokumen Stragegi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

Charisal Matsen A. Manu, BPS Kab. Alor

SPKD: Posisi dan Nilai Strategisnya bagi Pembangunan Berbasis Hak-hak Si Miskin

Andik Hardiyanto, KIKIS Jakarta

SESI DUA

Kerangka Konseptual yang Memihak Orang Miskin

Sulton Mawardi, SMERU

SESI TIGA

Mengembangkan Model Sistem Perencanaan Anggaran

Simson Jacob dan Supartono

SESI PERTAMA

Pembicara	Iing Mursalin
Topik	Tanggung Jawab Pemda dan Posisi SPKD dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional
Moderator	Apolos DP

Ir. Iing Mursalin adalah staf Bappenas Jakarta.

Pemaparan:

- Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan. Hasilnya adalah pada 1996 telah terjadi penurunan angka kemiskinan. Namun, semenjak krisis melanda bangsa ini pada 1997 angka kemiskinan kembali melonjak.
- Kebijakan masa lalu bersifat sentralistik yang berciri keseragaman kebijakan. Hal ini berdampak pada keseragaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.
- Pada awal 2000-2001 pemerintah menggunakan strategi baru dalam penanggulangan kemiskinan yang mendorong perubahan pola pikir. Kemiskinan bukan lagi masalah ekonomi melainkan sudah menjadi masalah kemanusiaan sehingga menjadi tanggung jawab bersama.
- Pada 2001 dibentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), yang anggotanya berasal dari pemerintah, LSM, perguruan tinggi, dan elemen masyarakat. KPK mencoba menyusun strategi penanggulangan kemiskinan (SPK) secara nasional maupun daerah.
- Permasalahan kemiskinan di tingkat kabupaten dapat dilihat dari hasil atau perolehan data yang berasal dari BPS dan BKKBN.
- Persoalan kemiskinan yang berada di daerah perbatasan diserahkan kepada pemerintah provinsi. Pembagian peran sangat penting dalam proses penanggulangan kemiskinan. Setiap kabupaten atau daerah diharapkan memiliki indikator lokal untuk mengukur tingkat kemiskinan masyarakat.
- SPKD diharapkan menjadi dokumen strategis di tingkat daerah dan menjadi acuan bagi setiap *stakeholder* di daerah untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan.
- SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) juga akan menjadi sarana konsensus di antara *stakeholder* pembangunan tentang berbagai hal. Termasuk mengintegrasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan.
- Kita masih memiliki ukuran yang berbeda tentang kemiskinan.
- Pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah menjadi sangat penting karena dalam proses penanggulangan kemiskinan tentu banyak masalah yang akan dihadapi.
- Setiap daerah harus memiliki indikator kemiskinan lokal.
- Di daerah peran pemerintah masih cukup besar sedangkan peran masyarakat masih sangat minim.

- Pemerintah daerah, baik legislatif maupun eksekutif kurang memiliki komitmen untuk penanggulangan kemiskinan. Juga belum ada pemahaman yang sama dalam konsep penanggulangan kemiskinan serta cara mengatasinya.
- Perlu pembenahan kelembagaan KPKD (Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah) agar bisa lebih efektif dan mampu mendorong berbagai *stakeholder* untuk terlibat.

Bahan Presentasi:

**TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH
DAN POSISI STRATEGI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH DALAM KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
NASIONAL**

Iling Mursalin

Staf Sekretariat Pokja Perencanaan Makro
Penanggulangan Kemiskinan BAPPENAS

Lokakarya Pengembangan Inisiatif Lokal untuk
Sistem Perencanaan dan Anggaran Publik
Berdasarkan SPKD

Kupang, 14 - 16 Oktober 2004

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TAHUN 2003



FAKTA KEMISKINAN: PengganguanTerbuka

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tambah Lapangan Kerja (Juta Orang)	Angkatan Kerja Baru (Juta Orang)	Pengganguan Terbuka	
				Juta Orang	%
1996	7,82	3,79	3,96	4,29	4,86
1999	0,79	1,14	2,11	6,03	6,26
2000	4,92	1,00	0,94	5,81	6,07
2001	3,44	0,97	3,16	8,00	8,10
2002	3,66	0,84	1,97	9,13	9,06
2003	3,99	1,10	2,10	10,13	9,85
2004	4,49	1,40	2,10	10,83	10,32
2005	5,03	1,75	2,07	11,19	10,45

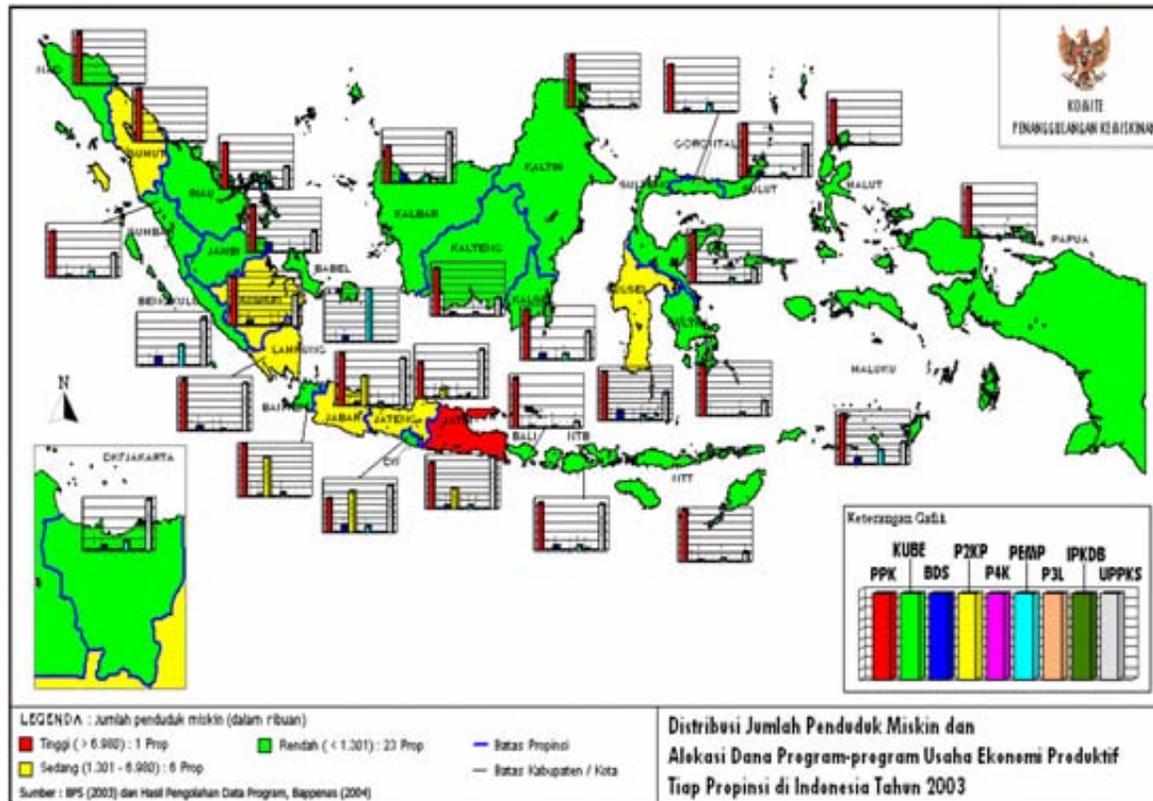
Keterangan: Tidak termasuk Propinsi NAD, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
Sumber: BPS, Indikator Ketenagakerjaan November 2003.

**Tabel Perkembangan Alokasi Dana
Program Penanggulangan Kemiskinan 2002-2004
(Ribuan Rupiah)**

No	Instansi Pelaksana	2002	2003	2004
1	BULOG	4.696.850.000	4.830.778.000	5.487.800.000
2	Dep. Kesehatan	1.219.739.000	1.878.825.000	2.503.843.000
3	Dep. Pendidikan*	2.331.833.000	2.269.572.000	3.401.274.000
4	Dep Kimpraswil	3.115.477.000	1.502.453.000	2.081.383.000
5	Dep. Sosial	1.109.370.000	844.761.086	1.469.250.000
6	BAPPENAS	425.000.000	355.129.451	-
7	Dep. Dagri	1.144.874.000	329.214.000	2.023.510.000
8	Dep. Kelautan dan Perikanan	98.225.000	208.560.000	280.544.000
9	BKKBN	1.370.833.000	156.299.000	500.000.000
10	Dep. Koperasi dan UKM	290.040.000	153.960.500	13.421.000
11	Dep. Pertanian	61.096.000	109.132.000	157.619.000
12	Dep. Nakertrans	593.284.000	100.000.000	805.350.000
13	Dep. Indag	43.909.000	5.921.732	
14	KM Pemb. Perempuan	4.000.000	1.876.000	2.866.000
15	BPS	7.088.000	294.000	1.164.100
16	Badan Pertanahan Nasional	29.702.000	31.625.000	30.760.000
	Jumlah Total	16.541.320.000	12.778.400.769	18.758.784.100

Alokasi Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan 2004

No	Departemen/LPND	Jenis Program				Jumlah	
		Langsung		Tidak Langsung		Program	Rp. (Juta)
		Program	Rp. (Juta)	Program	Rp. (Juta)		
1	Bulog	2	5.487.800	-	-	2	5.487.800
2	Departemen Kesehatan	6	2.503.843	-	-	6	2.503.843
3	Departemen Pendidikan Nasional	13	3.401.274	-	-	13	3.401.274
4	Dep. Pemukiman dan Prasarana Wil.	6	1.440.275	8	641.108	14	2.081.388
5	Departemen Sosial	17	1.406.250	5	-	22	1.469.250
6	Bappenas	-	-	-	-	-	-
7	Departemen Dalam Negeri	3	2.023.509	-	-	3	2.023.509
8	Departemen Kelautan dan Perikanan	6	280.545	-	-	6	280.545
9	BKKBN	2	500.000	-	-	2	500.000
10	Kementerian Koperasi dan UKM	6	13.421	-	-	6	13.42
11	Departemen Pertanian	3	157.619	-	-	3	157.619
12	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	305.850	1	499.500	5	805.350
13	Dep. Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-
14	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	-	-	6	2.866	6	2.866
15	Badan Pusat Statistik	-	-	8	1.164	8	1.164
16	Badan Pertanahan Nasional	3	30.760	-	-	3	30.760
Jumlah		71	17.551.146	28	1.207.638	99	18.758.784



EVALUASI KRITIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kebijakan dan program pemerintah kurang efektif dalam memecahkan masalah kemiskinan, dan mencegah proses pemiskinan dan pewarisan kemiskinan.

Kelemahan tersebut antara lain:

1. Sistem dan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat.
2. Kebijakan bersifat sektoral, terpusat dan seolah-olah Kemiskinan hanya menjadi urusan pemerintah semata.
3. Kurangnya kolaborasi dengan masyarakat madani.
4. Memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek yang tidak berdaya.
5. Masalah kemiskinan dipandang sama di semua wilayah.
6. Ketergantungan pada pembiayaan dari donor.

PERLUNYA STRATEGI BARU

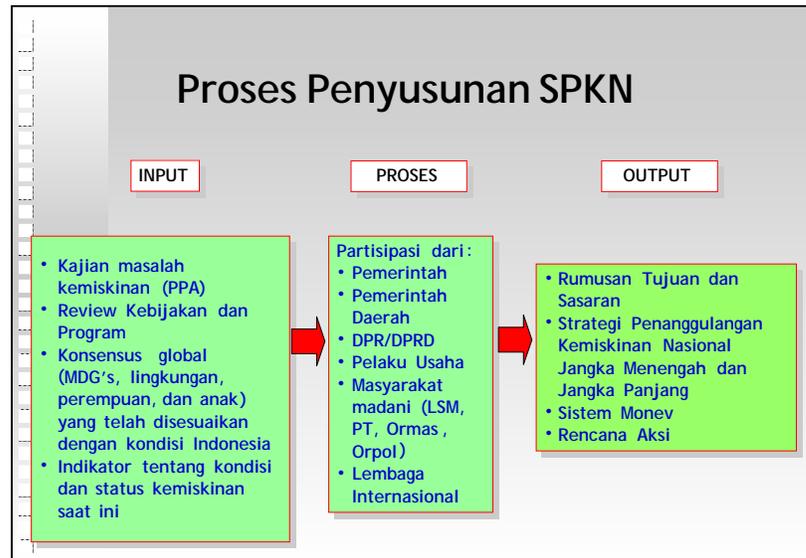
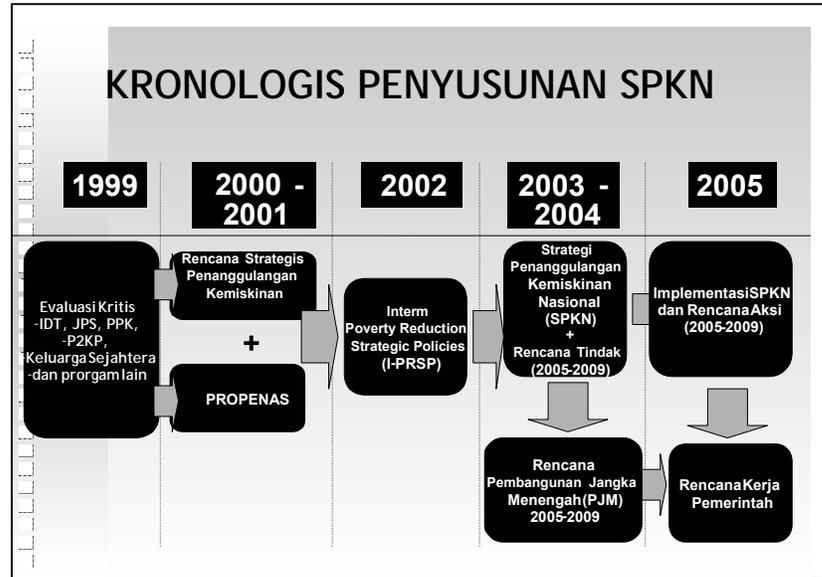
- Perubahan sikap dan perilaku yang lebih mendasar:
 - ✓ Perhatian dan penghargaan terhadap keluarga dan masyarakat miskin.
 - ✓ Nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, kemandirian, dan keadilan.
- Memotong proses pewarisan kemiskinan antargenerasi .
- Tidak lagi hanya menjadi urusan pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama: pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat madani (LSM, perguruan tinggi, ormas dan orpol).
- Penanggulangan kemiskinan menyangkut pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- Tidak hanya mengandalkan budget semata, tetapi didukung oleh sistem dan regulasi yang memihak rakyat miskin.
- Terpadu dan berkelanjutan.
- Perlu komitmen dan waktu yang panjang.

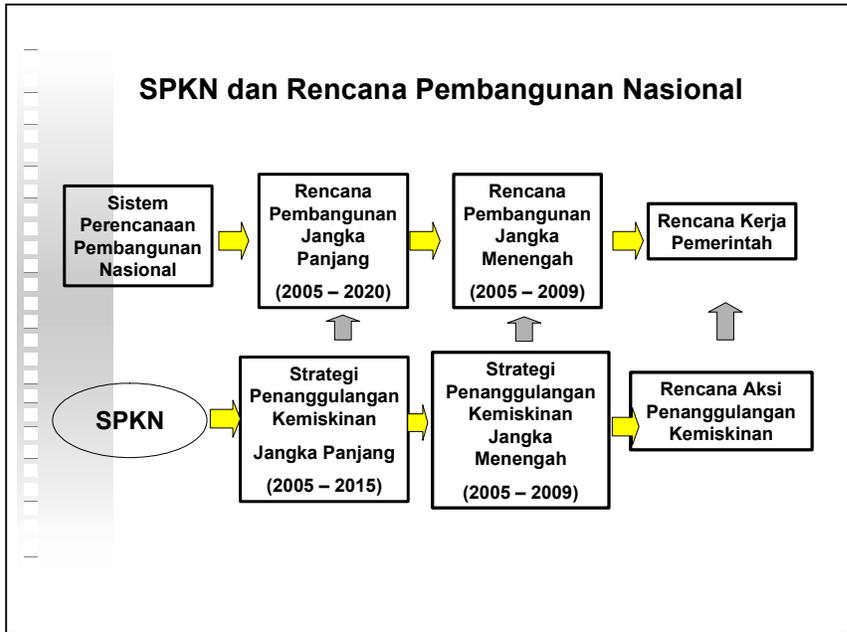
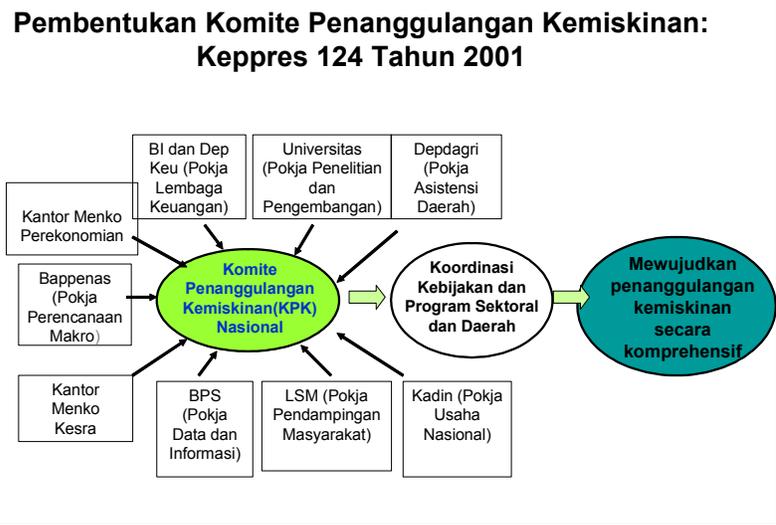
MAKNA STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL

- * Menunjukkan konsensus dan komitmen bersama sebagai bagian dari gerakan nasional penanggulangan kemiskinan.**
- * Memberikan arah bersama bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat madani sebagai pelaku pembangunan, baik di pusat maupun di daerah, dalam menanggulangi kemiskinan.**
- * Menerapkan paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan partisipatif dari semua pihak yang terkait mulai dari perumusan strategi dan kebijakan, penentuan tujuan dan sasaran serta pemantauan dan pengkajian terhadap kemajuan yang dicapai**

PERKEMBANGAN TERKINI

- Bulan Mei 2004, Draft Dokumen SPKN telah diserahkan dari TKP3KPK kepada KPK
- Masih diperlukan tahap Finalisasi SPKN termasuk perumusan rencana aksi dalam jangka waktu 5 tahun (2005- 2009).
- Masih diperlukan tahap integrasi SPKN ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (PJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (PJM) (Akhir September)
- Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional juga dipersiapkan sebagai masukan untuk agenda pemerintah baru mendatang.





Mengapa Daerah Memerlukan SPK Daerah?

- Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah telah menempatkan daerah, terutama kabupaten/kota pada posisi sentral pembangunan
- Daerah merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat
- Setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda

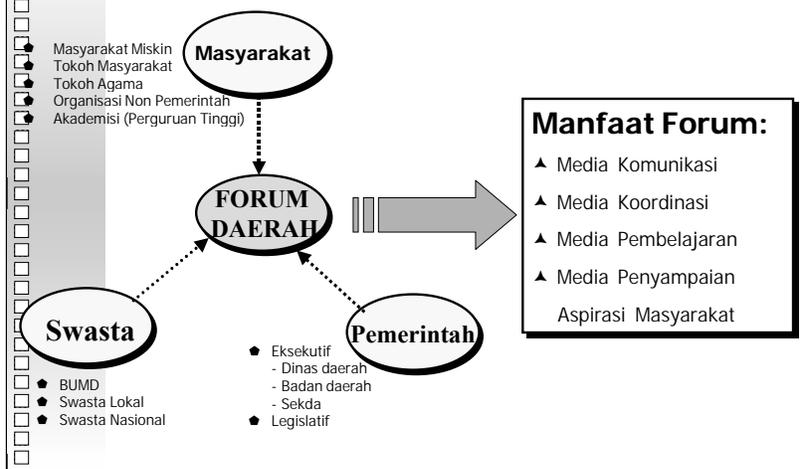
Fungsi SPK Daerah

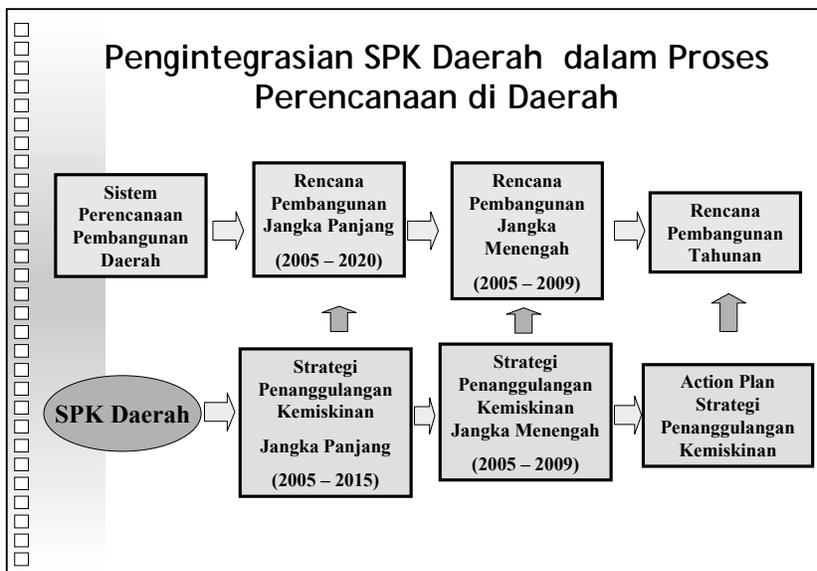
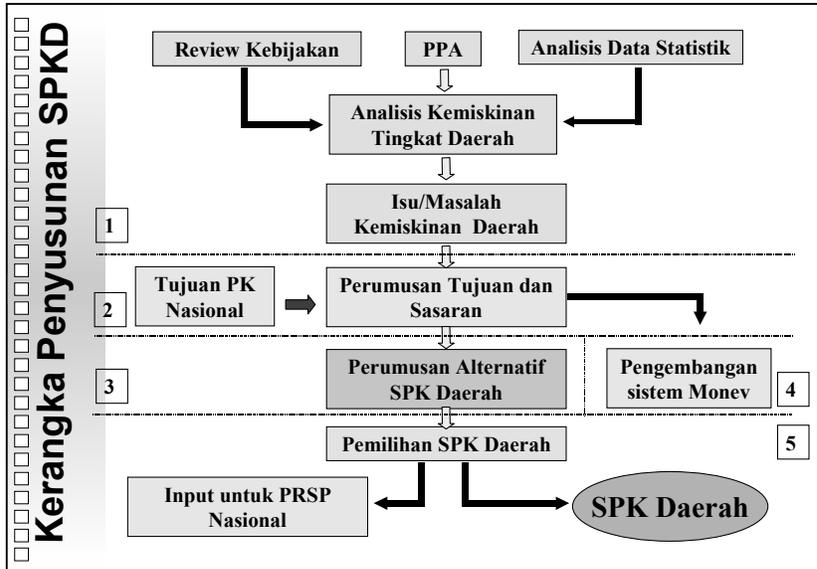
- SPK Daerah sebagai dokumen kebijakan strategis yang menyeluruh
- SPKD akan menjadi acuan bagi semua pelaku pembangunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan
- SPK Daerah merupakan saranan untuk membangun konsensus dan mengintegrasikan upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah dengan di tingkat nasional

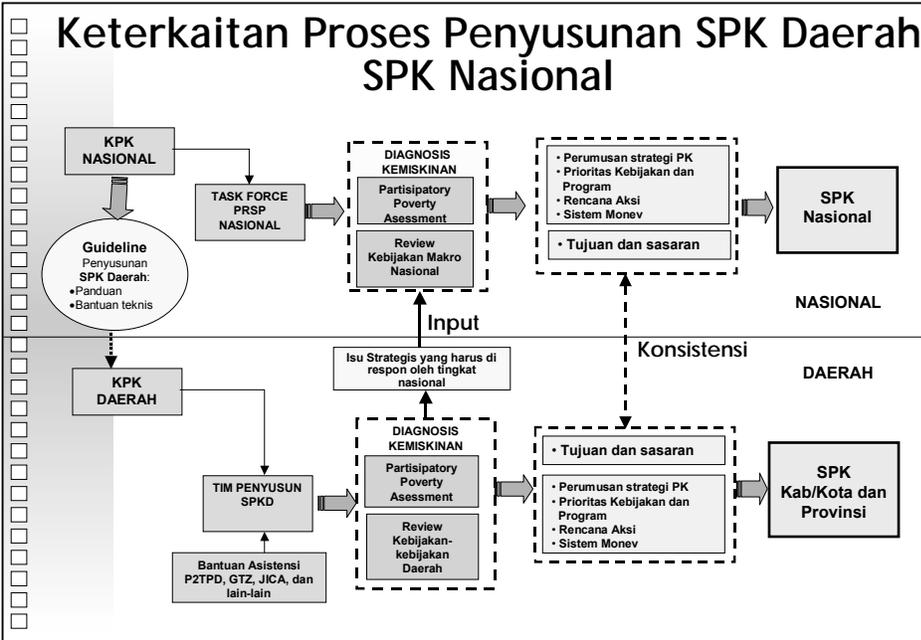
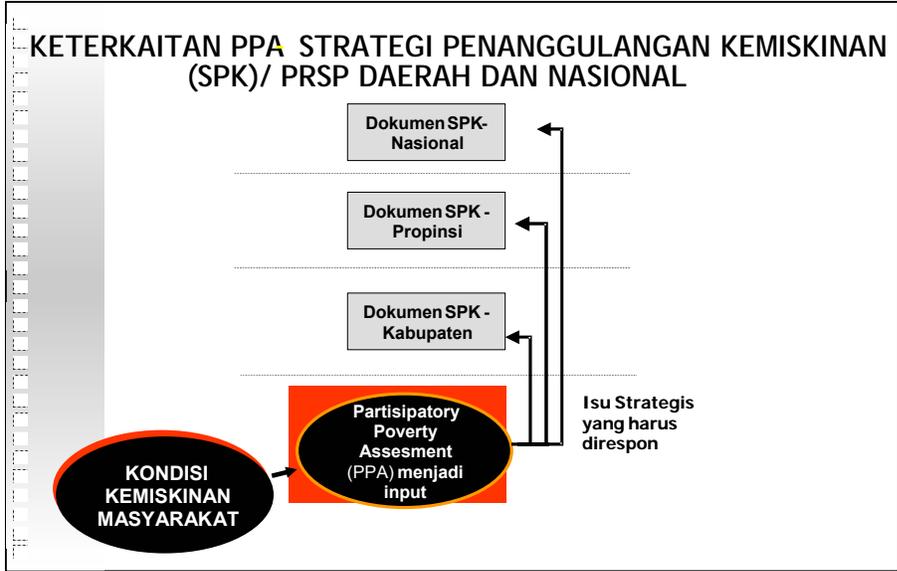
Tujuan Penyusunan SPK Daerah

- * Memberikan arah bersama bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan, baik di pusat maupun di daerah, dalam menanggulangi kemiskinan.
- * Menerapkan paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu dengan pendekatan partisipatif melalui konsensus dan komitmen bersama semua pihak yang terkait, dimulai dari perumusan strategi dan kebijakan.
- * Menunjukkan komitmen daerah sebagai bagian dari gerakan nasional penanggulangan kemiskinan.

Siapa Yang Menyusun SPK Daerah ?







Beberapa Daerah Telah Mulai Berinisiatif Dalam Penanggulangan Kemiskinan



BENTUK INISIATIF DALAM UPAYA PENGURANGAN KEMISKINAN DI KAB SOLOK (1)

- A. Membenahi kualitas pelayanan publik dengan melakukan pembaharuan tata pemerintahan melalui
➔ *GOOD LOCAL GOVERNANCE*:
- Menetapkan Perda TPA (No.1 ...tahun 2004)
 - Melaksanakan Integrity Pact (SK.Bup No.../BUP-2004)
 - Mengoptimalkan Pelayanan Satu Pintu Plus Pelimpahan 105 kewenangan ke pemerintahan Nagari
(Pemberian dana DAU Nagari, Pemberian dana Perimbangan, Pemberian dana Partispatif, Pemberdayaan lembaga-lembaga yang tumbuh dan berakar dalam budaya masyarakat Minangkabau (KAN, MTTS, Bundo Kandung dan lain-lain)

Tujuan Penyusunan SPK Daerah

- * Memberikan arah bersama bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan, baik di pusat maupun di daerah, dalam menanggulangi kemiskinan.
- * Menerapkan paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu dengan pendekatan partisipatif melalui konsensus dan komitmen bersama semua pihak yang terkait, dimulai dari perumusan strategi dan kebijakan.
- * Menunjukkan komitmen daerah sebagai bagian dari gerakan nasional penanggulangan kemiskinan.

BENTUK INISIATIF DALAM UPAYA PENGURANGAN KEMISKINAN DI KAB SOLOK (2)

- B. Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat miskin dengan meluncurkan berbagai program baik yang bersifat bantuan stimulan, pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan skill individu melalui
- Pembukaan daerah terisolir (12)
 - Relokasi penduduk daerah terisolir ke daerah yang mudah dijangkau (3 lokasi)

BENTUK INISIATIF DALAM UPAYA PENGURANGAN KEMISKINAN DI KAB. SOLOK (3)

C. Melakukan kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan pola partisipatif yaitu:

- Di Tingkat Nagari → Musbang Nagari.
- Melibatkan nagari dalam Tim Sinergi.
- Membentuk Tim Sinergi yang merupakan perpaduan berbagai *stakeholders* di Kabupaten Solok.
- Melibatkan masyarakat melakukan pengawasan pembangunan daerah: program Participatory Monitoring and Evaluation (PME) → petugas PME ditunjuk dengan SK Bupati.

KELUARAN YANG SUDAH ADA ATAS PELAKSANAAN INISIATIF

- Semakin banyaknya kegiatan yang dialokasikan ke dalam RAPBD Tahun 2005 yang *pro-poor*.
- Tumbuhnya komitmen untuk mengikutsertakan seluruh komponen dalam perencanaan pengurangan kemiskinan.
- Semakin eratnya hubungan eksekutif dan legislatif untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Lahirnya kesepakatan melalui indikator yang sama terhadap persoalan kemiskinan, sehingga tidak berdasarkan indikator sektoral, tetapi standarisasi indikator Kabupaten Solok.



- [Kembali ke Menu Awal](#)
- ## INDIKATOR KEMISKINAN DI KABUPATEN JEMBRANA
1. Status Keluarga (Lama Domisili).
 2. Pemilikan Rumah dan Pengelolaan Lingkungan.
 3. Pemilikan Tanah.
 4. Pendidikan.
 5. Pekerjaan dan Keterampilan.
 6. Usaha Ekonomi Produktif.
 7. Pemilikan Barang-Barang Berharga/Alat-Alat Rumah Tangga.
 8. Pendapatan Perkapita.
- [Kembali](#)

Peranan Provinsi Sulawesi Selatan telah berinisiatif untuk mengkoordinasikan upaya Pengurangan Kemiskinan

Peranan Pemerintah Daerah Provinsi	Kesepakatan Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota, LSM, Pemerintah Pusat dan Donor
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fasilitasi dialog antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah pusat, lembaga pemberi pinjaman ■ Mendorong interaksi <i>multi-stakeholders</i> dalam KPK daerah ■ Menyusun SPKD Provinsi yang akan menampung isuisu kemiskinan yang tidak dapat ditanggulangi kabupaten/kota ■ Menyiapkan instrumen untuk menilai kinerja kabupaten yang akan dikaitkan dengan pengalokasian dana dari APBD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> ■ <u>Kelembagaan</u> penguatan KPKD dengan dukungan kepala daerah ■ <u>Kebijakan dan Penganggaran Program</u> integrasi SPKD dalam Renstrada, SPM, dan APBD yang <i>pro-poor</i> ■ <u>Sumber Daya Manusia</u> peningkatan pengetahuan, perilaku dan keterampilan masyarakat ■ <u>Data dan Informasi</u> menyamakan persepsi, definisi, indikator, dan profil kemiskinan ■ <u>Pemantauan dan Evaluasi</u> dilakukan oleh pihak independen dan eksternal, mekanisme penyelesaian konflik dan pengaduan masyarakat

PEMBELAJARAN DARI PENGALAMAN BERBAGAI DAERAH

- Masih dominannya peran aparat pemerintah sesuai dengan SK
- Terbatasnya keterlibatan berbagai pihak seperti: perguruan tinggi, LSM, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi masyarakat, dan kelompok perempuan
- Kurangnya dukungan dari Pimpinan Daerah dan DPRD
- Lemahnya kemampuan KPKD dalam melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas pelaku
- Belum adanya pemahaman yang sama mengenai strategi penanggulangan kemiskinan secara komprehensif dan sistematis

LANGKAH-LANGKAH YANG DITEMPUH

- **Pembenahan Kelembagaan :**
 - **Restrukturisasi KPK (yang telah ada) sehingga lebih efektif**
 - **Mendorong keterlibatan seluruh pelaku (stakeholders) termasuk kelompok perempuan**
 - **Penguatan peran dan dukungan Pimpinan Daerah dan DPRD**
- **Penyusunan SPKD secara partisipatif dengan melibatkan stakeholder**
- **Perumusan Rencana Aksi/Tindak yang lebih operasional**
- **Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kaum miskin**
- **Sistem pengelolaan (delivery system) dan targeting secara tepat**
- **Mendorong upaya penanggulangan kemiskinan sebagai “gerakan bersama”**

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PERENCANAAN

- Aspirasi
 - ✓ Apakah mekanisme dan prosedur perencanaan yang ada dapat menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat miskin?
 - ✓ Bagaimana aspirasi dan suara masyarakat miskin menjadi arus utama perumusan kebijakan?
- Solusi
 - ✓ Apakah rencana kebijakan dan program yang disusun dapat memecahkan masalah kemiskinan?
 - ✓ Apakah kebijakan dan program dapat dilaksanakan oleh masyarakat miskin sendiri secara berkelanjutan?
- Skenario
 - ✓ Bagaimana skenario pemecahan masalah kemiskinan dalam jangka pendek, menengah dan panjang?

PENGANGGARAN

- Mobilisasi Sumber Dana
 - ✓ Bagaimana optimalisasi sumber-sumber dana dalam negeri baik dari pemerintah, swasta, perbankan maupun masyarakat?
 - ✓ Bagaimana mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dari luar Negeri?
- Instrumen Penganggaran
 - ✓ Apakah pengelolaan Dana Perbantuan (dekonsentrasi) sudah efektif?
 - ✓ Bagaimana dengan pengarusutamaan kebijakan dan program departemen?
 - ✓ Bagaimana komitmen pemda dalam mengelola Dana Alokasi Umum?
 - ✓ Apakah ada peluang menyempurnakan pengelolaan Dana Alokasi Khusus?

Pembicara	Salmiati Kaunang
Topik	SPKD Provinsi NTT, Partisipasi Orang Miskin, Agendanya dan Bagaimana Menjalankannya
Moderator	Apolos DP

Salmiati Kaunang adalah staf KPKD Provinsi NTT.

Pemaparan:

- Perbedaan angka kemiskinan antara BPS dan BKKBN sangat mencolok untuk daerah NTT. Ini disebabkan oleh sarana atau strategi yang dibuat oleh lembaga ini sangat berbeda. Variabel atau indikator yang digunakan oleh kedua lembaga ini juga berbeda. BKKBN memiliki data yang rinci dibandingkan BPS. Namun, yang pasti kedua lembaga ini memiliki kepentingan sendiri-sendiri dengan data yang diperoleh.
- Evaluasi yang dilakukan pemerintah provinsi menemukan ketidaksinkronan kelompok sasaran dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- Pemerintahan yang partisipatif belum terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan karena belum terbukanya ruang partisipasi masyarakat. Ciri dasar pemerintahan yang partisipatif adalah adanya transformasi dan perubahan yang berkaitan dengan perencanaan dan sistem anggaran. Juga perlu adanya akuntabilitas publik dari pemerintah.
- Pemberdayaan masyarakat miskin merupakan hal utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan itu harus diikuti dengan adanya peluang masyarakat untuk mengakses semua sarana yang disiapkan oleh masyarakat.
- Untuk NTT, kabupaten yang telah menyusun dokumen SPKD adalah kabupaten Alor.
- Ide tentang advokasi dari DPRD untuk masalah kemiskinan yang ada di daerah tentu dibutuhkan.
- Harus ada transformasi di semua bidang atau aspek. Pemerintah harus melakukan perubahan, demikian pun masyarakatnya. Juga perlu perubahan terhadap aturan yang ada.
- Pemberdayaan adalah hal terpenting dalam penanggulangan kemiskinan.
- Otonomi yang dimiliki setiap daerah harus disertai dengan perubahan dalam segi kapabilitas dan kapasitasnya. Karena jika tidak, otonomi bisa menjadi bumerang.
- Pemahaman eksekutif dan legislatif terhadap kemiskinan juga masih sangat berbeda, dan menyebabkan perbedaan perhatian.

Pembicara	Charisal Matsen A. Manu
Topik	Membangun Kebersamaan dalam Rangka Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
Moderator	Apolos DP

Charisal Matsen A. Manu adalah Kepala BPS Kabupaten Alor, serta ketua Tim Teknis Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Alor.

Pemaparan:

- Untuk melihat masalah dan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Alor, Pemda setempat mencoba menggunakan aspek budaya dan sosial Alor yang memiliki cukup keanekaragamannya.
- Penyusunan SPKD dilakukan dengan upaya mensinergikan apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan perencanaan pembangunan pemda.
- Perencanaan ke depan:
 - Membentuk forum KPK di tingkat desa
 - Jumlah anggaran yang jelas yang akan dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan
 - Perlu adanya desa contoh untuk penanggulangan kemiskinan
- Sebaiknya dokumen SPKD telah diselesaikan sebelum dibuatnya dokumen renstrada dan propeda.
- Bagi masyarakat Alor, masalah kemiskinan merupakan masalah yang berkaitan dengan harga diri. Karena itu, harga diri Alor harus diangkat dan kemiskinan harus menjadi masalah bersama yang harus ditanggulangi oleh seluruh elemen yang ada di daerah.
- Berbagai upaya yang bersifat *top-down* hanya mampu untuk menanggulangi kemiskinan secara kuantitas, sedangkan dari segi kualitas tidak terlalu berpengaruh.
- Penyusunan SPKD disusun sesuai dengan SK Bupati tentang Penunjukan Tim Teknis penyusunan SPKD. Tim Teknis ini terdiri dari berbagai komponen yaitu masyarakat, pemerintah, LSM, perguruan tinggi, pengusaha swasta dan masyarakat miskin. Tim Teknis ini terdiri dari dua pokja yang memiliki tugas yang berbeda. Pokja I bertugas untuk mengakomodir suara masyarakat tentang potret kemiskinan di Kabupaten Alor serta strategi yang diharapkan untuk penanggulangan kemiskinan. Pokja II bertugas untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan program pembangunan daerah selama lima tahun terakhir yang khusus bersentuhan langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan.
- Saat ini Pokja I di Kabupaten Alor sudah dapat menjalankan tugasnya dengan baik, namun Pokja II dalam menjalankan tugasnya masih menghadapi kendala. Pokja II sulit mendapatkan data ketika mencoba mengidentifikasi program dari setiap sektor yang bersentuhan dengan penanggulangan kemiskinan.
- Hasil kerja kedua pokja tersebut diseminarkan dan dilokakaryakan, yang melibatkan seluruh wakil dari elemen masyarakat.

- Dari berbagai masukan yang diperoleh dari seminar dan lokakarya tersebut akan dijadikan dasar untuk menyusun draf SPKD yang dilakukan oleh Tim Perumus. Setelah Draf SPKD selesai disusun, maka draf tersebut akan diseminarkan lagi, untuk mendapatkan masukan lagi.

Materi:

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu topik pembahasan yang menarik dan senantiasa diwacanakan pada berbagai kesempatan oleh berbagai pelaku. Pada tingkat global, melalui *Millennium Development Goals* (MDG) para pemimpin negara dan pemerintahan di seluruh dunia berkomitmen untuk memperhatikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan penduduk dan mencanangkan pencapaian yang sangat berarti selama 25 tahun sejak tahun 1990. Tujuan pertama dari MGD adalah bahwa pada tahun 2015 terjadi pencapaian dengan mengurangi setengah dari situasi kemiskinan dan kelaparan tahun 1990.

Pada berbagai tahapan pembangunan di Indonesia isu kemiskinan mendapatkan perhatian yang serius. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Pada tahun 2000, pemerintah telah secara tegas menetapkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS di mana sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun (2000-2005) adalah berkurangnya persentase penduduk miskin absolut sebesar 4% dari tingkat kemiskinan tahun 1999. Sebagai tindak lanjut dari keseriusan pemerintah adalah dengan pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) sesuai Keppres Nomor 124 Tahun 2001.

Menindaklanjuti Keppres di atas maka Pemerintah Kabupaten Alor dalam tahun 2003 telah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan Keputusan Bupati. Sebagai tindak lanjut dari Keputusan tersebut, pada awal tahun 2004 dibentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Alor. Ini menunjukkan komitmen yang tinggi dan tekad yang kuat dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Kabupaten Alor. Hakekat dari pembentukan komite dimaksud tidaklah sekedar melaksanakan amanat undang-undang, tetapi lebih didasarkan pada pemahaman bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah bersama yang harus ditanggulangi bersama.

Bagi masyarakat Kabupaten Alor kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat kemanusiaannya. Konsekuensinya urusan penanggulangan kemiskinan menjadi urusan bersama yang bersifat lintas pelaku, yaitu pemerintah (*state*), dunia usaha/swasta (*private sector*), dan masyarakat sipil (*civil society*). Sehubungan dengan hal ini maka perlu adanya keterpaduan, keserasian dan keharmonisan dalam menata langkah bersama agar upaya penanggulangan kemiskinan merupakan suatu upaya sinergis yang mampu mengakomodasi kepentingan lintas pelaku.

Berangkat dari pemahaman mendasar tentang hakekat upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dijelaskan di atas, maka pekerjaan penyusunan “Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Alor” akan bermakna strategis bila didasarkan pada suara dan kepentingan seluruh lintas pelaku yang berbasis masyarakat miskin, serta memiliki keterkaitan dengan system perencanaan dan penganggaran publik. Dengan demikian pelibatan masyarakat miskin maupun keterwakilannya dengan kepentingan mereka perlu mendapat tempat perhatian yang serius.

Dengan demikian dasar pelibatan berbagai komponen masyarakat dalam penyusunan dokumen SPKD Kabupaten Alor didasari pada pemahaman:

1. Persoalan kemiskinan merupakan persoalan bersama karena itu upaya penanggulangannya haruslah menjadi upaya bersama yang bersifat lintas pelaku, yaitu pemerintah (*state*), dunia usaha/swasta (*private sector*), dan masyarakat (*civil society*).
2. Pelibatan masyarakat miskin dalam upaya penanggulangan kemiskinan merupakan pilihan strategis, karena merekalah yang paling mengetahui tentang kondisi dan keinginannya sesuai keberadaannya.
3. Pengalaman menunjukkan bahwa berbagai upaya yang bersifat *top-down* hanya mampu mengurangi persentase penduduk miskin dalam ukuran kuantitas tapi tidak terlalu berpengaruh dalam hal kualitasnya.

Proses Penyusunan

Prosedur kerja yang ditempuh dalam penyusunan dokumen penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan tim teknis penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Alor terdiri dari lintas pelaku pembangunan, yakni pemerintah, LSM, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat miskin itu sendiri.
2. Untuk kepentingan operasional, tim teknis dibagi menjadi dua kelompok kerja (*pokja*). *Pokja* pertama bertugas menganalisis dan mengkaji data sekunder serta mengakomodasi suara masyarakat tentang potret kemiskinan di Kabupaten Alor serta strategi yang diharapkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ke depan. *Pokja* kedua bertugas mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah tahun 1999-2003 yang telah dikerjakan dalam menanggulangi kemiskinan di daerah.
3. Melalui mekanisme seminar dan lokakarya (*semiloka*) yang melibatkan pemerintah, LSM, pengusaha, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur pemuda, organisasi perempuan, anggota legislatif, dan wakil rakyat miskin dijangking berbagai masukkan dalam rangka penyusunan draft SPKD
4. Penyusunan draf SPKD oleh tim perumus.
5. Seminar draf SPKD.
6. Finalisasi dan penyusunan naskah akhir (dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Alor).

Harapan

1. Membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan, dan penyusunan Dokumentasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan tingkat desa.
2. Dokumen SPKD diperdakan.
3. Dokumen penganggaran secara jelas mencantumkan anggaran penanggulangan kemiskinan yang diumumkan dimedia lokal.
4. Desa model penanggulangan kemiskinan.

Penutup

Kemiskinan merupakan suatu kondisi sosial-ekonomi yang tidak disebabkan karena satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil interaksi dari berbagai kombinasi variabel yang saling kait-mengkait. Dengan demikian kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor. Sehubungan dengan hal ini maka perlu adanya keterpaduan, keserasian dan keharmonisan dalam menata langkah bersama agar upaya penanggulangan kemiskinan merupakan suatu upaya sinergis yang mampu mengakomodasi kepentingan lintas pelaku.

Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Alor disusun dengan mempertimbangkan aspek keikutsertaan dan partisipasi lintas pelaku, termasuk masyarakat miskin yang menjadi *target group* dari pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kemiskinan merupakan persoalan bersama yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah saja, namun juga masyarakat dan pihak swasta. Di samping itu, juga diperlukan keinginan dan motivasi dari individu masyarakat miskin untuk berubah ke arah kehidupan yang lebih layak. Dengan demikian dokumen ini merupakan suatu dokumen strategis sebagai acuan bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dapat mengkondisikan terciptanya sinkronisasi vertikal dan harmonisasi horizontal lintas pelaku.

Pembicara	Andik Hardiyanto
Topik	SPKD: Posisi dan Nilai Strategisnya bagi Pembangunan Berbasis Hak-hak Si Miskin
Moderator	Apolos DP

Andik Hardiyanto adalah Direktur KIKIS Jakarta.

Pemaparan:

- Kemiskinan sangat berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kemiskinan juga memiliki karakteristik lokal yang tentunya akan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.
- Indonesia belum mempunyai sistem perencanaan dan pembangunan yang baku sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini. Karena itu, kini rancangan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tengah dirintis.
- Proses inisiatif lokal perlu ditingkatkan, seperti yang telah dilakukan di Kabupaten Alor.
- Pembuatan perda khusus untuk proses penyusunan SPKD tentunya akan sangat berdampak positif, sehingga ada aturan hukum yang mewajibkan setiap daerah untuk menyusunnya. Upaya di-perda-kan proses penyusunan SPKD inilah yang disebut dengan proses adaptasi.
- Penyusunan SPKD tentunya harus melibatkan seluruh komponen. Dokumen SPKD tersebut harus memiliki rencana aksi yang akan dilakukan.
- BPS bukan didesain untuk mengeluarkan angka kemiskinan, namun dipaksakan untuk mengeluarkan angka kemiskinan.

Diskusi

Pertanyaan:

Yohanes Ndolu

- Sesuai dengan pengalaman di lapangan, biasanya ada suatu hal dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan itu yang sering kita lupakan, yaitu akar masalah yang menyebabkan seseorang menjadi miskin.
- Bagaimana kita dapat menemukan akar masalah dan menyelesaikannya?

Jawaban:

Charisal A. Manu

- Kita harus melihat fakta yang terjadi dan harapan masyarakat. Jika ada kesenjangan antara fakta dan harapan, maka tentunya merupakan masalah yang harus kita hadapi dan kita pecahkan.
- Solusi yang bisa kita ambil adalah melalui strategi, program, kegiatan maupun kebijakan.

Salmiati Kaunang

- Kita memang harus menemukan akar masalah untuk menemukan solusi penanggulangan kemiskinan yang tepat.
- Pendapatan per kapita seseorang masih merupakan masalah karena ada banyak faktor yang mempengaruhi pendapatan seseorang menjadi rendah.

Charisal A. Manu

- Kita harus terus mengkaji potensi investasi apa yang terbesar di setiap daerah untuk untuk peningkatan produksi bagi masyarakat.
- Kearifan lokal setiap daerah tentunya menjadi pendukung untuk meningkatkan kemampuan daerah menemukan solusi upaya penanggulangan kemiskinan.

Pertanyaan:

Ana Tiwu

- Di Belu, perbedaan angka kemiskinan begitu besar selisihnya. Angka kemiskinan BPS mencapai 83%, namun angka BKKBN dan KPKD (Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah) hanya 15%. Angka besar hanya untuk mendapatkan anggaran untuk daerah kabupaten.
- Kondisi di masyarakat kemungkinan tidak disurvei secara menyeluruh oleh tim pengkaji.
- Ada kasus PNS dapat raskin.
- Banyak perbedaan di setiap daerah dalam menentukan angka kemiskinan.

Jawaban:

Salmiati Kaunang

- Kita perlu mencoba menghilangkan dualisme angka, karena ada indikator berbeda yang diterapkan oleh setiap komponen peneliti/pengkaji. Karena itu perlu ada kesepakatan indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan.
- Biasanya angka kemiskinan yang besar akan digunakan untuk mendapatkan bantuan, misalnya data BKKBN dipakai untuk mendapatkan bantuan raskin.
- Komunikasi yang baik antara KPKD Provinsi dan Kabupaten atau Kota perlu dilakukan sehingga dapat ditemukan benang merah untuk dijadikan data bagi pemerintah provinsi.

Pertanyaan:

Ray Fernandes – DPRD TTU

Sampai saat ini kita belum mau bersikap jujur tentang angka kemiskinan. Secara nasional angka kemiskinan terus naik dan hal ini mendorong ego sektoral menjadi tinggi dan cenderung menjadikan kenaikan ini sebagai proyek. Sampai kapan kita bisa menuntaskan masalah kemiskinan jika masih bermental proyek?

Jawaban:

Iling Mursalin

- Kemiskinan adalah sesuatu yang dinamis baik dari segi penyebab maupun dampak yang diakibatkan serta ukuran-ukuran yang digunakan pun selalu berubah.
- Secara kuantitatif kita pernah mengalami penurunan angka kemiskinan namun tidak diimbangi dengan sisi kualitasnya. Kita harus tetap berusaha menyelesaikan sebaik mungkin, dengan melibatkan semua *stakeholder* dan melakukan evaluasi. Kami temukan bahwa tumpang tindih benar terjadi. Dalam SPKN ada pembagian peran, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kami harapkan ada sinkronisasi antara pusat dan daerah.
- SPKN yang dibuat telah dimulai dengan pembagian peran.
- Pada 2002 dana yang telah dikeluarkan untuk penanggulangan kemiskinan sebesar 16,1 triliun rupiah oleh seluruh departemen di tingkat pusat. Tapi dari

dana sebesar ini hasilnya apa? Pada 2003 dan 2004 dana ini meningkat menjadi 18,4 triliun rupiah. Jumlah tersebut adalah dana dari pemerintah, belum termasuk dana yang dikeluarkan oleh NGO yang besarnya mencapai 80 miliar rupiah per tahun. Dan juga dana yang dikeluarkan oleh BUMN sebesar 5%. Sebenarnya telah banyak dana dalam jumlah besar yang dikeluarkan untuk penanggulangan kemiskinan, namun hasil yang diperoleh tidak memuaskan.

- Masalah yang dihadapi adalah tidak adanya sinkronisasi program dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Karena itu, penanggulangan kemiskinan ini perlu menjadi tanggung jawab bersama dari pemerintah maupun NGO.

Salmiati Kaunang

Integritas sulit ditemukan, karena dari pusat sudah berwatak departemental sehingga sulit untuk terintegrasi.

Charisal A. Manu

Garis kemiskinan selalu berubah sesuai dengan percepatan kenaikan pendapatan dan perkembangan pasar. Ini merupakan persoalan yang terus dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Salmiati Kaunang

Ketika inflasi sebesar 10%, maka kenaikan angka kemiskinan menjadi 30%.

Apolos DP

- Dokumen SPKD merupakan hal penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan
- Perlu kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan baik untuk mengimbangi ego sektoral yang ada dalam pemerintahan.
- Perlu gerakan moral atau gerakan sosial dari kita semua untuk penanggulangan kemiskinan.

SESI DUA

Pembicara	Sulton Mawardi
Topik	Kerangka Konseptual yang Memihak Orang Miskin
Moderator	Simon Jacob

Ir. Sulton Mawardi MSc adalah peneliti Senior Lembaga Penelitian SMERU.

Pemaparan:

- Melalui anggaran kita dapat melihat implementasi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.
- Pemerintah terkesan mengabaikan tujuan utama untuk melayani masyarakat.
- Anggaran daerah atau APBD merupakan rencana kebijakan daerah yang diwujudkan dalam satuan uang. APBD merupakan sarana untuk melihat kemampuan daerah melaksanakan pembangunan.
- Fungsi anggaran: merupakan pedoman pemerintah daerah untuk mengelola pekerjaan pembangunan. Dengan APBD kita dapat menilai kinerja pemerintah. Anggaran berfungsi untuk mengalokasikan sejumlah dana sesuai dengan jumlah sektor. APBD dapat berfungsi sebagai stabilisasi karena dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. APBD adalah instrumen teknis operasional.
- Pemerintah perlu mengakui kelemahan dan kegagalan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kita harus wujudkan pemerintaan yang berpihak pada kelompok miskin.
- Terbukanya kontrol dari pihak luar terhadap apa yang dilakukan pemerintah.
- Anggaran yang disusun harus efisien dan efektif, serta perlu ruang untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya dari masyarakat untuk mengakses penyusunan APBD.
- Pemerintah daerah harus memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam pengelolaan anggaran, artinya perlu adanya akuntabilitas publik dari pemerintah.
- *Pro-poor budget* adalah penyusunan anggaran yang memperhatikan kepentingan masyarakat miskin di atas kepentingan yang lain. Kelompok miskin harus menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam penyusunan anggaran.
- Ada tiga aspek untuk melihat apakah suatu anggaran berpihak pada masyarakat miskin :
 - Aspek penyusunan anggaran
 - Aspek penerimaan daerah
 - Aspek pembelanjaan daerah
- Pemerintah berkewajiban untuk memberitahu kebijakan apa yang dibuat dan masyarakat memiliki hak mengetahuinya.
- Perlu adanya pengurangan terhadap belanja-belanja yang tidak efisien.
- Pemerintah daerah harus memahami dan mengetahui secara jelas kelompok miskin yang ada di daerah masing-masing serta dapat mengidentifikasi faktor penyebab kemiskinan. Kemiskinan merupakan peristiwa tragis yang dihadapi oleh manusia yang perlu ditanggulangi secara bersama.
- Kemiskinan tentunya harus menjadi musuh bersama untuk diperangi, jadi harus ada kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta atau LSM. Pemerintah dan

berbagai elemen yang ada harus memiliki agenda bersama yang harus dijalankan untuk memerangi kemiskinan.

- Harus ada aturan legal yang mendukung proses penanggulangan kemiskinan. Sehingga ada sanksi yang tegas bagi daerah yang tidak menyusun SPKD, begitu pun sanksi juga harus diberikan kepada pemerintah pusat jika tidak menyusun SPKN. Jadi perlu ada legal formal yang berkaitan dengan SPKD maupun SPKN, dibuat dalam bentuk perda, maupun peraturan pemerintah, sehingga jika terjadi pelanggaran bisa dituntut, dan dengan demikian pengawasan terhadap pelaksanaan SPKD maupun SPKN semakin baik.
- Tata pemerintahan yang baik akan mendukung terjadinya *pro-poor budget*.
- *Pro-poor budget* merupakan bagian dari prinsip-prinsip anggaran yang baik. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah
 - transparansi, artinya semua pihak memiliki akses yang cukup luas untuk mengetahui perencanaan, penyusunan dan pengalokasian anggaran. Juga dengan prinsip ini maka evaluasi dapat dijalankan dengan baik;
 - bersifat rasional, artinya penyusunan anggaran itu harus sesuai dengan kondisi daerah dan masyarakat setempat;
 - anggaran yang disusun harus efisien dan efektif;
 - demokratis;
 - *accountable*, artinya pemerintah harus memiliki tanggung jawab yang tinggi dan melihat anggaran sebagai amanat rakyat;
 - adil dan proporsional, artinya alokasi anggaran yang proporsional pada sektor-sektor tertentu yang sifatnya mendesak dan berhubungan dengan kepentingan masyarakat; dan
 - adanya evaluasi.
- *Pro-poor budget* adalah praktik penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja ditujukan untuk mengakomodasi suara dan kepentingan kelompok miskin.

Pengantar Diskusi:

KERANGKA KONSEPTUAL ANGGARAN YANG MEMIHAK ORANG MISKIN

Sulton Mawardi
Lembaga Penelitian SMERU

Basic budgeting problem: "On what basis shall it be decided to allocate \$ x to activity A instead of B" (V.O. Key, 1940)

1. Anggaran

Secara umum anggaran dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu institusi untuk suatu periode di masa yang akan datang. Dalam kaitan ini, APBD setidaknya dapat dimaknai sebagai a). rencana kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam ukuran uang, baik kebijakan penerimaan maupun pengeluaran, dan b). sarana untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan yang dipilihnya di masa lalu, serta perubahan kebijakan yang hendak dilaksanakan di masa akan datang. Dari perspektif administrasi negara, fungsi APBD antara lain: a) pedoman pemda dalam mengelola keuangan daerah, b) instrumen pengawasan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, c) instrumen untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Sedangkan dari perpektif ekonomi, fungsinya antara lain a) alokasi: penyediaan barang dan jasa sosial untuk pemenuhan pelayanan publik, b) distribusi: mekanisme pembagian sumber daya dan pemanfaatannya, misalnya untuk mengurangi kesenjangan melalui mekanisme pajak dan transfer, c) stabilisasi: misalnya untuk penciptaan lapangan kerja, pengendalian laju inflasi, dsb.

2. Pra-syarat Kebijakan

Anggaran yang memihak orang miskin merupakan kebijakan yang bersifat teknis operasional, dan hanya salah satu dari sekian banyak kebijakan lainnya yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan secara komprehensif. Terciptanya budget yang bersifat *pro-poor* mensyaratkan pra-kondisi seperti adanya kehendak politik yang kuat, *pro-poor policy*, *pro-poor institutions*, *pro-poor growth*, dan yang lebih penting lagi adalah adanya *pro-poor government* (pemerintahan yang memihak orang miskin).

a. Kehendak politik

- i. Adanya komitmen kuat dan tekad keras pihak-pihak yang secara langsung mempunyai kewenangan dan bertanggungjawab dalam penanggulangan kemiskinan;
- ii. Agenda pembangunan (daerah) menempatkan penanggulangan kemiskinan pada skala prioritas utama;

- iii. Kemauan untuk secara jujur dan terbuka mengakui kelemahan dan kegagalan penanggulangan kemiskinan di masa lalu, dan bertekad untuk memperbaikinya, baik pada waktu sekarang maupun di masa mendatang.

b. Iklim yang mendukung

- i. Adanya kesadaran kolektif untuk menempatkan kemiskinan sebagai musuh bersama yang harus diperangi, kemudian diikuti dengan langkah-langkah kampanye social melalui berbagai saluran informasi untuk lebih meningkatkan kepedulian, kepekaan, dan partisipasi masyarakat.
- ii. Ada peraturan dan kebijakan (pusat dan daerah) yang mendukung penanggulangan kemiskinan, misalnya yang berkaitan dengan usaha kecil, akses terhadap kredit, pedagang kaki lima, penghapusan pungli, dan sebagainya.

c. Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Mengingat kemiskinan bersifat multidimensi, penanggulangannya tidak cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan ekonomi, melainkan memerlukan pula kebijakan dan program di bidang sosial, politik, hukum dan kelembagaan. Dengan kata lain diperlukan adanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dari semua lembaga pemerintahan, baik eksekutif, legislative, lembaga hukum, dan lembaga pelayanan umum lainnya. Secara lebih spesifik hal ini antara lain ditandai dengan adanya keterbukaan, pertanggungjawaban publik, penegakan hukum, penghapusan birokrasi yang menyulitkan, penghapusan korupsi di semua lini (tingkat atas-bawah) dan skala (kakat-teri), serta koordinasi lintas lembaga dan pelaku yang baik. Studi empiris oleh Turkewitz (2001) di beberapa negara menyimpulkan adanya hubungan yang kuat antara karakter suatu regim pemerintahan dengan capaian berbagai indikator pembangunan, antara lain:

- a. Makin efektif suatu pemerintahan, makin rendah tingkat kematian bayi.
- b. Makin rendah tingkat korupsi di birokrasi pemerintahan, makin tinggi tingkat melek huruf orang dewasa.
- c. Makin baik kondisi penegakan hukum suatu negara, makin rendah tingkat kematian bayi.
- d. Makin sedikit regulasi yang diciptakan pemerintah, makin tinggi tingkat pendapatan per kapita.

3. Prinsip Penyusunan Anggaran yang Baik dan *Pro-poor Budgeting*

Dalam wacana yang lebih luas, kebijakan *pro-poor budget* sebenarnya merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip-prinsip penganggaran yang baik. Prinsip-prinsip penganggaran yang menurut KIKIS, IMF, IDASA, Fitra, CiBA, meliputi:

- 1) **Transparan:** Beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan antara lain:
 - a) Dokumen anggaran dapat dengan mudah diakses oleh publik.
 - b) Dibukanya akses/partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan, indikasinya antara lain:
 - i. Dalam proses penyusunan anggaran dibuka ruang bagi keterlibatan publik secara langsung.

- ii. Adanya hubungan yang kuat antara program dan nilai alokasi anggaran dengan kondisi aktual kebutuhan masyarakat.
 - iii. Prosentase usulan publik yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan penetapan nilai anggaran. Hal ini akan tercermin dari nilai keputusannya itu sendiri, seperti seberapa besar penetapan anggaran mengakomodir kepentingan publik, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah.
- c) Adanya kebijakan yang memberikan tempat/ruang kontrol dan monitoring oleh lembaga independen dan masyarakat, baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media: "*check and balance*"
- d) Adanya prosedur pertanggung jawaban pelaksanaan/pengelolaan keuangan (negara dan daerah) yang transparan dan menjamin hak informasi publik.
- 2) **Rasional:** Perhitungan besaran penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan cermat berdasarkan data yang akurat sesuai dengan kondisi aktual ekonomi makro dan mikro. Perhitungan dilakukan dengan metode yang jelas dan terukur, bukan dengan perkiraan-perkiraan dan kepentingan pihak tertentu.
- 3) **Efisien dan Efektif:** Perhitungan dan penetapan nilai anggaran mengutamakan prinsip penghematan, dan pembelanjaan anggaran berorientasi pada capaian hasil dengan memperhatikan tingkat produktivitasnya secara sosial maupun ekonomi. Sedangkan prinsip efektifitas dapat diukur melalui ketepatan alokasi anggaran pada sasaran yang jelas dan waktu alokasi sesuai kebutuhan.
- 4) **Demokratis:** Proses penyusunan, perumusan, pembahasan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran harus melibatkan publik, baik secara perorangan, kelompok maupun kelembagaan. Keputusan yang diambil harus meyerap aspirasi masyarakat, dan dapat memberikan manfaat ekonomis maupun politis kepada masyarakat luas, *khususnya kelompok masyarakat yang secara social ekonomis termajinalkan*. Prinsip anggaran yang demokratis dan prinsip lainnya yang terkait, mempunyai dasar alasan yang kuat karena hal itu memang menjadi hak rakyat, dan menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Secara tekstual, aturan yang mengatur mengenai hal ini antara lain:
- a) UUD 45, pasal 23 menyatakan rakyat berhak untuk ikut dalam penyusunan dan pengambilan keputusan anggaran.
 - b) UU no.25, 1999 pasal 27 ayat 2: Informasi yang dimuat dalam sistem keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui masyarakat.
 - c) PP no.20, 2001, pasal 18: Masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan atau organisasi masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan ini dapat bersifat langsung atau tidak langsung, baik lisan maupun tertulis berupa permintaan keterangan, pemberian informasi, saran dan pendapat kepada pmda, DPRD dan lembaga lainnya.
- 5) **Akuntabel:** adanya tanggungjawab yang tinggi dari pemerintah (daerah) dalam mengelola anggaran sebagai amanat rakyat. Hal ini dicerminkan oleh:
- i. Adanya komitmen pemerintah untuk mengelola anggaran secara transparan;
 - ii. Adanya jaminan yang jelas terhadap hak-hak masyarakat dalam pelaksanaan anggaran; dan

iii. Adanya prosedur pertanggungjawaban anggaran oleh pemerintah kepada publik yang diatur dalam suatu kebijakan/peraturan (daerah).

6) **Keadilan dan Proporsional:** Anggaran dialokasikan secara proporsional pada sector-sektor tertentu yang sifatnya mendesak dan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, sekaligus sebagai kompensasi pemerintah kepada kelompok masyarakat tertentu (miskin) untuk mengurangi ketimpangan pendapatan akibat ketidakadilan ekonomi.

Selain menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kebijakan anggaran yang baik harus pula disertai dengan memberikan ruang yang cukup bagi kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran. Dalam tahapan proses evaluasi anggaran, beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya adalah:

- Setiap pelaksanaan anggaran dibuat laporannya dan disampaikan kepada lembaga audit dan publik.
- Adanya audit disampaikan kepada legislative dan publik
- Setiap temuan audit ditindaklanjuti
- Adanya keterlibatan masyarakat dalam melakukan kontrol pelaksanaan dan menindak lanjuti hasil audit anggaran
- Adanya evaluasi dampak, baik dampak umum yang mencakup aspek ekonomi, politik dan sosial, maupun dampak khusus yang terjadi dalam sektor atau program/proyek tertentu. Hasil evaluasi dampak ini kemudian dijadikan acuan untuk merumuskan anggaran pada siklus (tahun) anggaran berikutnya.

Dengan mengacu pada beberapa prinsip anggaran (yang baik) tersebut, maka secara sederhana kebijakan anggaran yang bersifat pro-poor miskin dapat diterjemahkan sebagai *praktek penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja ditujukan untuk mengakomodir suara dan kepentingan masyarakat miskin*. Berdasarkan definisi ini, setidaknya ada tiga aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah (daerah) dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan anggaran supaya ia dapat dikategorikan sebagai kebijakan anggaran yang bersifat pro-poor.

3.1 Aspek Penyusunan Anggaran

Salah satu elemen strategi yang bias membuka peluang bagi terciptanya kebijakan pro-poor budget adalah melalui mekanisme **participatory budgeting**. Sayangnya, penentuan keputusan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, kemiskinan, dan juga soal anggaran, masih sering dilakukan di belakang pintu tertutup dan hanya melibatkan segelintir elite saja. Kelompok masyarakat lokal dan kelompok masyarakat miskin tidak didorong atau diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Untuk mengaplikasikan **participatory budgeting**, beberapa pelajaran yang bias dipetik dari negara lain diantaranya meliputi:

- a) Perumusan anggaran dilakukan melalui *public hearings*, debat di media massa, dan proses pengambilan keputusan politik dilakukan secara terbuka.
- b) Analisa anggaran dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, termasuk kelompok masyarakat miskin, sehingga mereka mempunyai akses terhadap informasi mengenai mata anggaran pokok, biaya dan dampaknya terhadap kelompok miskin.

Kedua hal itu perlu dilakukan karena pada dasarnya adalah menjadi hak masyarakat untuk tahu, dan menjadi kewajiban pemerintah untuk memberi tahu terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan. Dengan melibatkan mereka secara langsung dalam proses itu, pemerintah daerah dapat mengetahui secara tepat apa yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh kelompok masyarakat (miskin). Aspirasi mereka dapat dengan cepat diterjemahkan ke dalam formulasi kebijakan operasional, sehingga dapat mengurangi distorsi kebijakan.

Keterlibatan masyarakat seperti itu tidak harus diartikan sebagai mengurangi peran dan fungsi DPRD maupun jajaran pemerintahan daerah lainnya. Mereka justru merupakan mitra dialog bagi legislative dan eksekutif untuk bersama-sama memecahkan problem daerah dalam pengentasan kemiskinan. Dengan pola pengambilan putusan yang bersifat partisipatif, DPRD dan juga eksekutif justru diuntungkan, karena prinsip-prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel telah dipraktekan, dan hal ini pada gilirannya justru akan memperkokoh legitimasi mereka.

3.2 Aspek Penerimaan

Komponen penerimaan daerah yang dapat direkayasa oleh pemerintah daerah dalam rangka membuat anggaran yang pro-orang miskin adalah pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat sumber PAD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah pajak dan retribusi daerah, maka pemerintah daerah dapat membuat kebijakan anggaran yang bersifat pro-orang miskin antara lain dengan:

- a. Tidak membuat kebijakan pungutan daerah yang secara langsung membebani orang miskin. Misalnya dengan membebaskan mereka dari keharusan membayar pengobatan di Puskesmas, SPP, retribusi KTP, dan sebagainya.
- b. Tidak membuat kebijakan pungutan daerah yang secara tidak langsung membebani orang miskin. Misalnya pajak dan atau retribusi daerah yang dikenakan terhadap hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan, industri rumah tangga, industri kecil, yang diproduksi oleh kelompok masyarakat miskin. Memang benar pungutan demikian dibebankan kepada pedagang, tetapi karena ia merupakan komponen biaya tataniaga, maka beban biaya ini kemudian ditransfer kepada agen ekonomi di hulu, sehingga yang menanggung pajak/retribusi adalah para petani, nelayan, pengrajin yang rata-rata kemampuan ekonominya lemah (miskin).
- c. Jika dua opsi tersebut tidak dapat dilaksanakan, setidaknya pemerintah daerah dapat membuat kebijakan pungutan yang bersifat progressif, yakni mengenakan tarif khusus (lebih murah) terhadap kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin.

3.3 Aspek Pembelanjaan Daerah

Langkah berikutnya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menciptakan anggaran yang bersifat pro-orang miskin adalah melalui perkeayasaan aspek pembelanjaan daerah. Dalam hal ini ada dua pendekatan yang dapat ditempuh sekaligus, yakni:

1) Pembelanjaan sektoral dan lintas sector

- a) Alokasi pembelanjaan pemerintah daerah (juga pusat) yang ditujukan untuk program pengentasan kemiskinan secara langsung umumnya relatif kecil. Untuk mengatasi hal ini, alternatif kebijakan yang tidak kalah pentingnya adalah dengan efektifitas setiap pembelanjaan yang berkaitan dengan orang miskin. Artinya, pemberlanjaan di bidang seperti pendidikan dasar, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan sebagainya, kemanfaatannya diupayakan benar-benar dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin.
- b) Pembelanjaan pemerintah untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan tidak selalu harus diterjemahkan sebagai sekedar menambah belanja untuk program ini atau program itu. Upaya pengentasan kemiskinan memerlukan perubahan dan peningkatan pembelanjaan di banyak sektor. Mengingat ketersediaan dana yang terbatas, hal ini hanya biasa dilakukan jika pembelanjaan yang tidak efisien dan “bad targeted” (against the poor) dapat dikurangi.
- c) Strategi pengentasan kemiskinan justru akan mengalami kekurangan/cacat secara mendasar jika hal itu tidak dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pembelanjaan pemerintah secara umum terhadap aspek kemiskinan. Untuk ini, salah satu pendekatan yang dapat ditempuh adalah dengan menganalisa penerima proporsi manfaat dari belanja publik menurut kelompok penghasilan. Metode umum yang biasa dipakai adalah mengelompokkan masyarakat ke dalam 5 (*quintiles*) atau sepuluh (*deciles*) kelompok (dikelompokkan dari yang paling miskin sampai paling kaya), dan kemudian dilihat proporsi manfaat yang diterima oleh masing-masing kelompok. Dengan metode ini kemudian dapat disimpulkan apakah kebijakan belanja publik bersangkutan bersifat:
 - a. Pro-orang miskin (*progressive*);
 - b. Netral;
 - c. Lemah (terhadap orang miskin); dan
 - d. Pro-orang kaya (*regressive*)

Sebagai contoh, dengan menggunakan data gabungan APBD Kabupaten/Kota TA 1999/2000 (288 kabupaten/kota), data SUSENAS dan Podes 2000. Jasmina, et al (2001) menganalisis alokasi belanja pembangunan di masing-masing kabupaten/kota sample apakah bersifat pro-orang miskin, netral atau pro-orang kaya.¹ Sektor pembangunan yang dijadikan indikator adalah sektor pertanian dan kehutanan, transportasi, pendidikan kesehatan dan sektor perumahan dan pemukiman. Secara singkat hasil studi ini menunjukkan:

- a) Rata-rata pembelanjaan untuk sektor pertanian, pendidikan dan perumahan lebih banyak dinikmati oleh kelompok 20% masyarakat miskin. Untuk sektor transportasi dan kesehatan manfaat yang dinikmati oleh 20% kelompok masyarakat miskin relatif sama dengan yang dinikmati oleh 20% kelompok

¹Pengeluaran publik bersifat: a) pro-orang miskin (*progressive*) jika kelompok masyarakat miskin mendapatkan proporsi manfaat yang lebih besar daripada kelompok masyarakat kaya, b) pro-oran kaya (*regressive*) jika proporsi manfaat untuk kelompok masyarakat miskin lebih kecil daripada yang dinikmati oleh kelompok masyarakat kaya, dan c) netral jika proporsi manfaat yang dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat kaya relatif sama.

masyarakat terkaya. Tetapi jika digunakan variable binary, secara rata-rata prosentase penerima manfaat untuk sektor transportasi dan sektor kesehatan relatif lebih kecil untuk kelompok masyarakat miskin dibandingkan dengan kelompok masyarakat kaya. Dengan kata lain, pengeluaran untuk sektor transportasi dan kesehatan cenderung bersifat regresif sampai dengan netral.

- b) Analisis keseluruhan dengan menggabungkan hasil perhitungan proporsi pengeluaran pembangunan sektoral dengan hasil *incidence analysis* untuk kelima sektor memperlihatkan bahwa dari 268 kabupaten/kota, hanya 93 kabupaten/kota (35%) yang telah menerapkan kebijakan pembelanjaan yang bersifat pro-orang miskin. Dengan demikian kebijakan anggaran yang diterapkan oleh sebagian besar pemerintah kabupaten/kota belum memihak pada orang miskin.
- c) Selain analisis kuantitatif, studi tersebut juga melakukan analisis kualitatif. Indikator yang digunakan antara lain berupa ada/tidaknya program pemerintah daerah untuk penanggulangan kemiskinan, aspek partisipatif masyarakat dalam penyusunan anggaran, proses dan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan yang sedang/telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dari 40 kabupaten/kota yang dianalisa. 18 kabupaten/kota telah menerapkan kebijakan yang bersifat pro-orang miskin. Sisanya, 22 kabupaten/kota belum menerapkan kebijakan yang bersifat pro-orang miskin.

3.4 Pembelanjaan untuk Program Pengentasan Kemiskinan

1. Di era otonomi sekarang, meskipun penyeragaman nomen-klatur mata anggaran masih berlaku, daerah sebenarnya mempunyai kewenangan penuh untuk membelanjakan dananya sesuai dengan kepentingannya. Jika dikehendaki, daerah dapat membuat mata anggaran khusus yang diperuntukkan bagi program pengentasan kemiskinan.
2. Meningkatnya pembelanjaan yang bersifat program langsung pengentasan kemiskinan disertai dengan prinsip dan praktek pembelanjaan yang lebih baik. Untuk ini syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah pemerintah harus memahami dengan benar siapa sebenarnya yang tergolong miskin (dalam arti karakteristik social dan konsentrasi geographi), faktor-faktor yang menyebabkan mereka menjadi miskin, dan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi dalam masyarakat miskin.
3. Secara praktis, pendekatan untuk mencapai target program pengentasan kemiskinan dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu target secara luas (*broad targeting*) dan target secara sempit (*narrow targeting*). Pendekatan pertama ini tidak menargetkan orang miskin secara langsung sebagai individu-individu. Program yang ada lebih diarahkan pada penyediaan pelayanan yang dibutuhkan orang miskin. Dalam hal ini Pemda dapat mengalokasikan anggaran untuk menyediakan pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi. Pendekatan ke dua langsung ditujukan kepada individu, keluarga atau kelompok yang secara tegas dinyatakan sebagai orang miskin. Diantara dua pendekatan ini, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh kaena itu kombinasi dari kedua pendekatan ini merupakan alternatif terbaik.

4. Penutup

Kemiskinan merupakan salah satu tragedi terbesar kemanusiaan, dan sampai sekarang tragedi ini belum biasa ditanggulangi secara tuntas, bahkan di beberapa kawasan justru menunjukkan gejala yang makin parah. Selain karena alasan kemanusiaan dan moral, memerangi kemiskinan merupakan upaya yang sangat rasional ditinjau dari banyak kepentingan. Antara lain hal itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (melalui peningkatan produktivitas), demokratisasi, mengurangi konflik dalam masyarakat, dan lain sebagainya.

Filosofi dan definisi kemiskinan yang makin luas cakupannya mengharuskan strategi kebijakan penanggulangannya bersifat multidisiplin, lintas sektoral dan terus berkelanjutan. *Pro-poor budget* memang sangat diperlukan, tetapi kebijakan ini saja tentu tidak cukup. Mengingat APBN dan APBD lebih merupakan instrumen kebijakan pemerintahan, maka persoalannya justru terletak dan tergantung pada sifat regim pemerintah itu sendiri. Jika regim pemerintahan yang ada mempunyai karakter untuk memihak orang miskin, maka berbagai kebijakan publik, institusi, birokrasi, dan penganggaran yang diterapkan akan dengan sendirinya bercirikan keberpihakan kepada orang miskin. Hal sebaliknya akan terjadi jika regim pemerintahannya yang ada lebih sibuk dengan dirinya sendiri.

REFERENSI

- Anonym, 2001. Summary of Proceedings on Training of Trainers Program on Public Expenditure Management, June 2001, Tokyo.
- BKPK, SMERU 2001. Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan.
- CiBA, 2003. Panduan Praktis Mengontrol APBD.
- Jasmina, Thia, et al 2001. Analisa Peringkat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Ekonomi dan Keuangan Indonesia Vol. XLIX No.4, 2001.
- KIKIS, 2002. Kampanye Advokasi Kebijakan Alternatif Penanggulangan Kemiskinan Struktural. www.kikis.or.id.
- World Bank, 2001. Indonesia, Constructing a New Strategy for Poverty Reduction.

Diskusi

Pertanyaan:

Rofinus Manek – BPMD Kab. Kupang

Setelah data tentang keluarga miskin tersedia, apakah KPK dapat menjalankan tugas dengan baik dalam rangka penanggulangan kemiskinan?

Ray Fernandes

Memang sudah ada perubahan paradigma proses penyusunan struktur APBD. Namun, sampai saat ini perbandingan antara belanja aparatur atau pegawai dengan belanja publik masih tidak seimbang. Artinya orientasi pengalokasian dana dalam APBD belum berpihak pada rakyat. Ini bisa terjadi karena perangkat aturan yang berkaitan dengan penyusunan APBD belum ada perubahan. Karena itu, perangkat aturan yang selama ini menjadi panduan penyusunan APBD harus menjadi bahan diskusi bersama sehingga ada perubahan untuk waktu yang akan datang. Dalam belanja aparatur juga yang terlihat lebih banyak adalah untuk belanja perjalanan dinas.

Charisal A. Manu

- Dikotomi antara belanja rutin dan belanja pembangunan memang masih merupakan masalah yang sulit untuk diterobos selama pemerintah pusat masih setengah hati.
- Kita masih memiliki kesulitan untuk menaikkan belanja pembangunan karena kemiskinan kita dan DAU yang kita miliki dimanfaatkan untuk belanja rutin dan sisanya untuk belanja pembangunan. Karena itu, seharusnya pemerintah sudah membedakan pengalokasian anggaran untuk belanja rutin dan belanja pembangunan.
- Sebaik apa pun prinsip yang ada, pada akhirnya sangat ditentukan oleh rezim yang sedang memerintah.

Dan Pobas – Kabag Ekonomi TTS

Apa yang perlu dilihat saat ini untuk penanggulangan kemiskinan adalah mekanisme dan sistem yang sedang kita gunakan. Sistem dan mekanisme itu yang harus kita evaluasi sehingga kita tidak lagi menyalahkan lembaga atau kelompok.

Maksi Tanesib

- Daerah memang tidak memiliki dana. PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Daerah memang memiliki DAU (Dana Alokasi Umum) yang merupakan dana perimbangan, namun dialokasikan 70% untuk belanja aparatur dan sisa 30% untuk sektor jasa dan penanangan kemiskinan. Tentunya jumlah tersebut tidak akan membantu kita untuk keluar dari masalah kemiskinan.
- Di pusat terdapat beberapa sumber dana seperti dana cadangan, DAK (Dana Alokasi Khusus) dan lainnya. Pemerintah daerah terkadang diundang untuk mengajukan proposal untuk mendapatkan dana tersebut. Namun, proses yang dilewati daerah sangat panjang. Proposal yang diajukan daerah seringkali ditolak dan diminta untuk diperbaiki. Hal ini tentu berpengaruh pada biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan proposal tersebut.

Jawaban:

Sulton (SMERU)

- Kita tentunya tidak bisa terlalu berharap pada KPK (Komite Penanggulangan Kemiskinan) untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada. Hal ini karena KPK tidak termasuk dalam jabatan struktural.
- Seringkali anggaran yang sebenarnya milik publik disebut sebagai anggaran pemerintah sehingga yang terjadi adalah biaya rutin atau biaya perjalanan dinas akan lebih besar dari biaya pembangunan untuk masyarakat.
- Perjalanan dinas masih sulit dihilangkan oleh birokrasi kita.
- DAU 2005 akan dinaikkan sekitar 1% dari 25% menjadi 26%. DAU memang dianggap masih sangat minim oleh pemerintah daerah karena dana sektoral di setiap sektor masih sangat besar.
- Ada anggapan bahwa DAU akan menjadi senjata bagi pemerintah pusat untuk membuat daerah sangat bergantung.
- Sumber dana yang masih bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan adalah DAK.

Pertanyaan:

Remigius Halek – Belu

Keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha cukup kuat sehingga mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan di daerah. Ini bisa terjadi karena pada saat awal suksesi kepemimpinan daerah telah ada kerja sama di antara mereka.

Yohanes Ghewa – Increase

Kita harapkan agar hasil dari kegiatan ini perlu disampaikan kepada pemerintah supaya dapat menjadi masukan untuk upaya penanggulangan kemiskinan.

Simson Jacob

Kita seringkali berhadapan dengan masalah birokrasi, akibatnya kita masih memiliki kesulitan untuk bertatap muka secara langsung ketika berdiskusi tentang masalah kemiskinan. Walaupun demikian, kita tetap berharap agar forum ini dapat menghasilkan rekomendasi yang cukup baik untuk dijadikan masukan bagi pemerintah.

Jawaban:

Sulton (SMERU)

- Selama pemerintah daerah menjalankan tugasnya dengan baik, niscaya mereka akan memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat
- Pemerintahan yang kita lihat selama ini sepertinya telah menjadikan dirinya sebagai lembaga independen terlepas dari rakyatnya. Hal ini tercermin dalam pembelanjaan anggaran yang mengutamakan kepentingan pemerintah. Kalau pun ada sisa, akan digunakan untuk pembelanjaan publik.
- Rakyat semakin sadar akan hak-haknya, karena itu ketika mereka terus diperdayai, maka akan terjadi pembangkangan sosial bahkan revolusi sosial.
- Apa yang dilakukan pemerintah daerah saat ini tentu memberi pengaruh yang besar pada pemilihan langsung kepala daerah. Jika pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat, maka itu akan menjadi investasi sosial yang sangat berharga.

SESI KETIGA

Acara	Diskusi Kelompok
Topik	Mengembangkan Model Sistem Perencanaan Anggaran
Fasilitator	Simson Jacob dan Supartono

Supartono adalah staf KIKIS Jakarta.

Panduan diskusi:

- Apa yang perlu dipahami bersama adalah bahwa SPKD merupakan kebijakan baru. Karena itu, SPKD juga perlu di-perda-kan.
- Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan SPKD perlu terus ditingkatkan.
- Perlu ada indikator yang jelas untuk menentukan kelompok rentan yang harus mendapat perhatian dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Penentuan kelompok sasaran harus jelas sehingga ketika ada bantuan, maka bantuan itu tepat pada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
- Ditinjau dari segi partisipasi, SPKN seharusnya disusun setelah adanya SPKD dari setiap daerah.

Peserta diskusi dibagi menjadi tiga kelompok

Pemaparan Hasil Diskusi Kelompok:

Hasil Diskusi Kelompok I

Presenter: Daniel Pobas

1. Ciri-ciri penting kegiatan penganggaran publik pada SPKD di Wilayah NTT
 - Adanya prioritas pada program NTT;
 - Tingginya partisipasi masyarakat dalam penyusunan SPKD sampai dengan penetapan anggaran;
 - Di-perda-kan;
2. Prinsip-prinsip sistem perencanaan dan penganggaran publik pada SPKD
 - Transparan, rasional;
 - Efisien dan efektif;
 - Demokratis;
 - Akuntabel/bertanggung gugat;
 - Komprehensif.
3. Strategi sebagai pedoman proses perencanaan dan penganggaran publik pada SPKD
 - Menggunakan strategi pendekatan sektoral berdasarkan kebutuhan wilayah;
 - Jangka waktu: pendek, menengah dan panjang;
 - Penentuan dari bawah ke atas dan atas harus tetap evaluasi di bawah.

4. Tahapan-tahapan penganggaran publik pada SPKD
 MUSRENBANGDUS ⇔ MUSRENBANGDES ⇔ MUSRENBANGCAM
 ⇔ MUSRENBANGKAB

5. Garis-Garis kegiatan penganggaran publik pada SPKD
- Identifikasi kebutuhan;
 - Penentuan skala prioritas;
 - Penentuan plafon anggaran;
 - Sumber dana;
 - Pengalokasian anggaran berdasarkan prioritas jenis anggaran;
 - Monitoring dan evaluasi (monev);
 - Diperdakan.

Hasil Diskusi Kelompok II

Presenter: Iswardi Lay

Diskusi kelompok ini berdasarkan pada kenyataan bahwa sampai saat ini Provinsi NTT belum memiliki dokumen SPKD. Oleh karena itu, kelompok ini menggunakan pengalaman penyusunan APBD oleh eksekutif dan legislatif.

APBD	SPKD
1.a. Prioritas aparat b. Bukan investasi c. Tidak ada analisis masalah d. Dana cadangan habis digunakan e. Dana taktis digunakan bebas	1. a. Prioritas publik b. Investasi c. Analisis dengan PPA dan review kebijakan d. Dana cadangan tidak dihabiskan e. Dana taktis digunakan sesuai aturan
2. a. Transparan hanya untuk legislatif dan eksekutif b. Dokumen APBD sulit diakses publik c. Tidak diaudit/dimonitor oleh lembaga independen untuk <i>check and balance</i> d. Berbasis kinerja, tetapi indikatornya sulit diukur	2. a. Transparan untuk legislatif, eksekutif dan masyarakat b. Mudah diakses publik c. Terbuka untuk diaudit dan dimonitor oleh lembaga independen d. Berbasis pada orang miskin dengan indikator yang dibangun secara partisipatif
3. Pedoman renstrada, AKU APBD, unit-unit sektor Bappeda, legislatif	3. Tahapannya OK, tetapi ketika di unit/sektor melibatkan masyarakat miskin secara langsung
4. Musrenbangdus → Musrenbangdes → UDKP → Rakorbang	4. Pokmas → Musrenbangdus → Musrenbangdes → UDKP → Rakorbang
5. Mekanisme skala prioritasnya	5. Skala prioritasnya ditentukan dengan PPA

Hasil Diskusi Kelompok III

Presenter: Ferdinand Bano

1. Ciri-ciri penting kebijakan penganggaran publik pada SPKD di wilayah NTT
 - Partisipatif (melibatkan masyarakat miskin dalam hal perumusan masalah, identifikasi, rumusan rencana program kegiatan, pelaksanaan, monev);
 - Fokus rakyat miskin dan rentan;
 - Dana proporsional terhadap orang miskin;
 - Bersifat programatik/nonproyek.
2. Prinsip-prinsip sistem perencanaan dan penganggaran publik pada SPKD
 - Transparansi
 - Akuntabilitas
 - Demokratis
 - Adil
3. Strategi sebagai pedoman proses perencanaan dan penganggaran publik pada SPKD
 - Rencana terpadu (sektor)
 - Bersama rakyat miskin
4. Tahapan-tahapan penganggaran publik pada SPKD
 - Perencanaan
 - Pelaksanaan
 - Monitoring
 - Evaluasi
5. Garis-garis besar kegiatan penganggaran publik pada SPKD
 - Penentuan skala prioritas kegiatan dan target grup
 - Membuat rincian kebutuhan menurut kegiatan
 - Alokasi dana menurut kegiatan dan kebutuhan
 - Koordinasi kerja, eksekutif dan legislatif

Catatan: dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. Konsultasi publik
- b. Dukungan politik parlemen
- c. Publikasi terbuka di media massa
- d. Akses dan kontrol publik

Diskusi Pleno

Moderator: Simson Jacob

Simson Jacob

Ketiga kelompok telah memaparkan hasil kelompoknya. Sebelum mengeksplorasi lebih jauh tentang materi yang telah didiskusikan, maka terlebih dahulu kita berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan tanggapan, tambahan maupun masukan pada hasil diskusi kelompok yang telah disampaikan.

Charisal A. Manu

Untuk kelompok dua dan tiga, pertanyaan nomor dua tidak dijawab secara jelas.

Maksi Tanesib

Kami tidak memasukannya karena kami berpikir bahwa kelompok satu sudah melakukannya. Sebenarnya kita semua memiliki pertanyaan yang sama sehingga apa yang kita jawab hanya untuk saling melengkapi.

Yohanes Ghewa

- Ketika ada keterbukaan untuk dimonitor atau diaudit oleh lembaga independen, maka pada saat itu kita telah melakukan apa yang disebut dengan akuntabilitas.
- Pada saat kita menerapkan perencanaan partisipatif atau penyusunan anggaran partisipatif, maka akan berkembang demokratisasi.

Simson Jacob

Apakah kita sepakat bahwa apa yang dibicarakan oleh teman-teman kelompok satu itu bisa diterima? Sebenarnya sudah ada tapi tidak semuanya termuat atau dijelaskan oleh kelompok satu.

Remigius Halek

Sesuai dengan beragam pertanyaan dalam rangka diskusi, maka tentunya setiap kelompok akan mengaitkannya dengan kondisi yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Karena itu, akan muncul keinginan kita untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Mungkin kita juga perlu mendalami lagi diskusi ini sehingga nantinya hasil diskusi tersebut akan menjadi pegangan bagi kita ketika kembali ke daerah masing-masing.

Simson Jacob

Apa yang mau diperoleh dari diskusi ini adalah pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar. Setelah itu kita akan mengeksplorasi lebih mendalam lagi sehingga akan ditemukan perbedaan dengan pola penyusunan anggaran yang selama ini dilakukan.

Supartono

Prinsip-prinsip dasar, yaitu informatif dan terprediksi/dapat diukur, berbasis pada kelompok miskin dengan indikatornya, yaitu partisipatif. Anggaran yang disusun diharapkan terprediksi sehingga tepat sasaran.

Simson Jacob

Apakah kita sepakat dengan Tono? Sebenarnya memang prinsip informatif dan terukur itu merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Artinya bahwa setiap program yang dibuat harus terukur.

Ray Fernandes

Informatif sudah terakomodasi dalam prinsip transparan. Kelompok dua memasukkan enam prinsip secara naratif.

Remigius Halek

Menurut kami transparansi sudah mencakup informatif.

Dan Hurek

Transparansi menurut kami sudah informatif. Terprediksi perlu dimasukkan, terprediksi, yaitu sesuai yang dapat diramalkan.

Simson Jacob

Hampir semua kelompok telah menyebutkan tahapan-tahapan dalam penyusunan anggaran. Ini merupakan jaminan kelembagaan yang berkaitan dengan perencanaan. Tetapi, yang seharusnya ada, adalah jaminan legislasi sehingga ketika apa yang diusulkan masyarakat tidak dijawab, masyarakat memiliki kekuatan untuk melakukan komplain kepada eksekutif.

Charisal A. Manu

Memang kita tidak bisa menjamin bahwa semua keinginan masyarakat itu akan diakomodasi. Karena bisa saja apa yang disampaikan masyarakat itu adalah keinginan dan bukan kebutuhan. Jadi, apapun yang diputuskan dari atas harus dapat dijelaskan dan dimengerti oleh masyarakat. Karena itu, keterlibatan masyarakat harus sampai pada tahap penetapan, tidak hanya pada tahap pengusulan.

Ray Fernandes

Harus ada ruang yang luas bagi publik untuk mengkritisi/menggugat.

Dan Hurek

Ada permainan di tingkat sektoral. Perlu dilihat apakah itu keinginan atau kebutuhan.

Simson Jacob

Jaminan legislasi dibutuhkan karena merupakan aspirasi dari masyarakat luas. Dengan demikian, ketika ada usulan masyarakat yang tidak diakomodasi, masyarakat punya kekuatan untuk mempertanyakan kepada pemerintah tentang usulan mereka yang tidak diakomodasi.

Daniel Hurek

Miskin itu multidimensi, karena itu kita tidak bisa memagari dengan aturan.

Supartono

Tahap perencanaan menjadi sangat penting karena pada tahap ini tim perencana berusaha untuk mengidentifikasi seluruh usulan masyarakat dan membedakan antara yang kebutuhan dan keinginan. Pada dasarnya kebutuhan masyarakat adalah prioritas.

Simson Jacob

Sebenarnya kebutuhan orang miskin kalau diminta memilih antara meningkatkan pendapatan atau mengurangi pengeluaran, yang akan dipilih adalah mengurangi pengeluaran mereka. Soal meningkatkan pendapatan mereka punya kemampuan, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengurangi pengeluaran.

Daniel Hurek

Mengangkat derajat orang miskin bukan hanya dengan menggunakan pendekatan ekonomi semata, kalau perlu juga meningkatkan kapasitas masyarakat. Jadi, tidak hanya mengurangi pengeluaran.

Simson Jacob

Persoalan kemiskinan memang merupakan peningkatan kapasitas, tetapi upaya peningkatan kapasitas jelas membutuhkan biaya yang cukup besar. Karena itu, kita perlu mengurangi pengeluaran dalam kerangka peningkatan kapasitas.

Daniel Pobas

Peningkatan kapasitas penanggulangan kemiskinan tentunya membutuhkan komitmen dari legislatif dan eksekutif, juga berbagai komponen yang ada di luar.

Charisal A. Manu

Kalau memang kita telah memiliki komitmen untuk menanggulangi kemiskinan maka tentunya perda tidak diperlukan lagi. Tetapi, tentunya kita tetap membutuhkan berbagai aturan atau perda yang mengawal berbagai tahapan penanggulangan kemiskinan.

Simson Jacob

- Saya kira kita telah menemukan berbagai konsep tentang penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya kita akan makan malam bersama, lalu beristirahat. Besok pagi kita akan kumpul bersama untuk menyusun rencana tindak lanjut (RTL).
- Ada hal penting yang nantinya menjadi bahan diskusi penyusunan RTL, yaitu: sejauh mana pemahaman kita tentang SPKD/ SPKN dan posisinya dalam sebuah perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Itu berarti bahwa masih ada persoalan yang perlu kita tindak lanjuti bersama, dan kita perlu membangun pemahaman bersama tentang SPKD dan posisinya dalam perencanaan di daerah. Kita juga perlu menyiapkan basis agar bisa terlibat secara maksimal dalam proses penyusunan SPKD.

HARI KETIGA

Rencana Tindak Lanjut (RTL)
Simson Jacob

SESI PERTAMA

Acara	Diskusi Kelompok
Topik	Rencana Tindak Lanjut (RTL)
Moderator	Simson Jacob

Diskusi Awal:

Simson Jacob

- Dari berbagai materi yang telah kita peroleh dan juga dari hasil diskusi yang ada, kita akan mencoba untuk merancang RTL.
- Panduan untuk RTL:
 - Membangun pemahaman bersama tentang SPKD dan posisinya dalam perencanaan pembangunan di daerah;
 - Langkah tindak lanjut untuk merespon masyarakat agar dapat terlibat dalam proses penyusunan SPKD.

Marthen Duan - YTM

- Dari hasil diskusi yang ada, panitia bisa menentukan RTL apa yang mau dibuat, lalu peserta akan memberikan masukan.
- Di Kabupaten TTU, KPK belum berjalan/tidak ada. Kelembagaan seperti ini perlu menjadi perhatian.

Simson Jacob

- Kelembagaan KPK merupakan forum *multistakeholder*, namun sepertinya belum terimplementasi dalam perencanaan penyusunan SPKD untuk penanggulangan kemiskinan.

Rofinus Manek – Kab. Kupang (BPMD)

- Tidak semua yang hadir di sini adalah pengambil keputusan, karena itu pertemuan ini mungkin tidak akan efektif.
- Panitia perlu merancang RTL dan kami peserta memberikan tanggapan.

Charisal A. Manu

Penanggulangan kemiskinan merupakan keharusan yang didukung oleh aturan. Karena itu, kita perlu membuat RTL secara bersama.

Daniel Pobas

Kita perlu memiliki alur yang sama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk merancang kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Simson Jacob

- Kita akan secara bersama membuat RTL, untuk itu kita akan masuk dalam dua kelompok.
- Dengan panduan yang ada kita coba merancang RTL dengan menentukan kegiatan, tempat, yang perlu dilibatkan dan penanggung jawab dalam kegiatan.

Peserta dibagi menjadi dua kelompok diskusi

II. DISKUSI KELOMPOK

Hasil Diskusi Kelompok I

Presenter: Yupensia – YTB

1. Bagaimana membangun pemahaman tentang SPKD.
 - Pemahaman tentang SPKD: dokumen strategis yang dihasilkan secara partisipatif dengan mengakomodasi suara dan kebutuhan orang miskin yang merupakan acuan upaya penanggulangan kemiskinan yang bersifat komprehensif integratif.
 - Cara memberikan pemahaman:
 - Persuasif = sosialisasi
 - Instruksi Gubernur NTT
 - Siapa yang terlibat
 - Gubernur (dengan bantuan PIAR, KIKIS dan SMERU)
 - KPK provinsi (sosialisasi ke daerah)
 - Peserta lokakarya masing-masing daerah
2. Posisi SPKD
Sebagai bagian dari renstra kabupaten/ kota dan menjiwai renstra (dengan fokus orang miskin).

Hasil Diskusi Kelompok II

Presenter: Yohanes Ghewa – Increase

1. Bagaimana membangun pemahaman bersama tentang SPKD
Penanggulangan kemiskinan sudah menjadi strategi nasional. Di tingkat pusat, dilegitimasi dan dipayungi secara yuridis formal dengan Keppres dan yang dihasilkan yaitu dokumen strategis penanggulangan kemiskinan nasional. Di tingkat provinsi, dilegitimasi dengan SK Gubernur dan dibentuk KPKD Provinsi. Supaya pemahaman bersama ini menjadi ikatan hukum maupun moral maka kami Kelompok I mengusulkan agar di tingkat kabupaten/kota di-perda-kan. Jadi, bukan hanya sebatas SK Bupati atau yang lainnya. Karena asumsi kita bahwa ketika di-perda-kan, maka akan mengikat semua komponen, baik pemerintah maupun masyarakat untuk memerangi musuh bersama yaitu kemiskinan.
2. Langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menghasilkan SPKD yang aspiratif adalah komposisi tim, pembentukan tim, dan identifikasi kegiatan. Dalam menyusun langkah-langkah ini, semua komponen harus terlibat, baik pemerintah, pihak swasta/ LSM maupun masyarakat.

Diskusi Pleno

Moderator: Simson Jacob

Simson Jacob

- Apa yang menjadi pertanyaan berikut bagi kita semua adalah apa yang menjadi isi dari sebuah wadah?
- Kita membutuhkan sosialisasi namun perlu direncanakan model sosialisasi yang akan dilaksanakan.
- Persoalan SPKD untuk banyak daerah masih merupakan sesuatu yang kabur, padahal SPKD harus menjadi dasar karena menjadi dokumen strategis

penyusunan renstra dan lainnya. SPKD harus menjadi jiwa bagi setiap perencanaan yang ada di daerah.

- Perlu ada langkah-langkah yang konkret dari semua *stakeholder* untuk merencanakan penyusunan SPKD.

Charisal A. Manu

- Kelembagaan KPK harus ada revisi sehingga tugas KPK dapat berjalan dengan baik. Untuk Alor kita sudah melakukannya.
- Bagi daerah lain mungkin kelembagaan KPK merupakan hal yang baru sehingga tidak diakomodasi dalam APBD

Simson Jacob

Kita semua memang punya pemahaman bahwa semua elemen yang terlibat dalam KPKD paham akan keberadaannya, namun dalam kenyataannya beberapa elemen masih kurang memahami KPKD. Memang sebenarnya kelembagaan KPK itu perlu direvisi, dan mungkin baru Alor yang melakukannya sedangkan daerah lain belum.

Lery Mboeik

Perlu ada langkah konkret dalam bentuk kegiatan yang seharusnya kita lihat dan temukan bersama sehingga dapat menemukan jalan keluar terbaik untuk menanggulangi kemiskinan.

Yohanes Ghewa

Perlu ada revisi kelembagaan KPKD, dan setelah itu perlu merancang berbagai lokakarya di tingkat daerah.

Simson Jacob

Revisi kelembagaan memang harus terjadi di tingkat kabupaten dan menjadi acuan untuk tingkat daerah.

Marthen Duan

- Saya kira sangat sulit bahwa kegiatan ini bisa merekomendasikan suatu hal besar bagi pemerintah untuk merevisi kelembagaan.
- Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan pendekatan dengan pimpinan wilayah dalam hal ini gubernur sehingga dapat menginstruksikan para bupati atau walikota.

Simson Jacob

Perubahan cara berpikir yang ada saat ini menuntut dilakukannya revisi kelembagaan. Untuk masuk pada tahapan perubahan pola pikir mengenai revisi kelembagaan, kita bisa merancang berbagai kegiatan sebagai dasar, misalnya seminar, lokakarya atau pelatihan-pelatihan yang menggunakan pola pendekatan PPA.

Maxi - TTU

Sebenarnya telah ada SK pembentukan lembaga KPKD namun belum difungsikan oleh beberapa daerah. Karena itu, perlu sosialisasi lewat berbagai kegiatan untuk memotivasi pelaksanaan SK tersebut.

Albert Oliver

SK Gubernur sudah tersedia, namun baru dilaksanakan oleh tiga daerah. Karena itu, mungkin perlu tindakan lanjutan yang bukan hanya SK. Misalnya, perlu ada pelatihan atau lokarya sehingga memacu daerah.

Lery Mboeik

Apa yang perlu diperhatikan adalah mengsinergikan pentingnya SPKD antara eksekutif dan legislatif supaya ini dapat berjalan. Jadi, hal ini sebenarnya menjadi tugas dari peserta yang berasal dari eksekutif dan legislatif.

Albert Oliver

Ketika instansi mengusulkan berbagai program untuk dibahas di sidang dewan, terkesan bahwa program yang diusulkan secara tersembunyi sehingga sangat sulit untuk dibahas secara mendalam.

Simson Jacob

Penyusunan SPKD masih dianggap kurang penting sehingga tidak dianggarkan padahal telah memiliki kekuatan hukum. Karena itu, perlu ada forum bersama untuk menyatakan bahwa penyusunan SPKD itu sangat penting agar bisa dianggarkan.

Daniel Pobas

Keppres dan SK Gubernur sudah tersedia, tetapi mengapa mandeg di tingkat kabupaten? Kelompok 1 menyerukan bahwa penanggulangan kemiskinan itu penting dan merupakan komitmen bangsa. Instruksi ini juga penting bagi bupati agar mau menjalankan penanggulangan kemiskinan ini.

Simson Jacob

Di sini kita akan berbagi peran karena sebenarnya telah ada aturan yang mengatur tentang penanggulangan kemiskinan.

Charisal A. Manu

Perlu ada penyampaian secara umum kepada pemerintah tentang pentingnya penyusunan SPKD.

Ray Fernandes

Kalo kita hanya mengandalkan diri sendiri, maka akan menemui jalan buntu. Karena itu, perlu bagi peran, di antaranya: apa yang dapat dilakukan SMERU dan PIAR. Materi-materi ini akan saya kopi untuk dibagi ke teman-teman di TTU agar mereka mengerti.

Lery Mboeik

Apa yang disampaikan Bapak Charisal sudah dibicarakan dalam diskusi kelompok. Tetapi yang akan kita bahas adalah hal yang akan kita sosialisasikan bersama. Bila PIAR atau SMERU memiliki materinya, maka PIAR akan bantu untuk menyebarkannya.

Simson Jacob

Setiap daerah perlu mendesain kegiatan sesuai dengan tingkat perkembangan di daerah dan tentunya kita semua harus berbagi peran. Workshop di tiap daerah harus dilaksanakan.

Lery Mboeik

Komponen lokal bertanggung jawab atas berbagai kegiatan yang mau dibuat.

Simson Jacob

Dukungan dari pemda, KPKD, NGO, legislatif tentu diperlukan. Selain itu, SMERU, KIKIS, PIAR juga harus mengambil bagian. SMERU dan KIKIS sebagai sumber informasi perubahan model perencanaan. PIAR akan mengambil peran sebagai negosiator/pelobi. Kegiatan operasional merupakan tanggung jawab daerah sehingga daerah harus menetapkan waktu pelaksanaannya (mulai 2005).

Charisal A. Manu

Bila memungkinkan dalam waktu dekat sudah dilaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan SPKD dan penanggulangan kemiskinan. Instruksi pembuatan SPKD dari Gubernur dan *deadline* Desember 2004 perlu dipercepat.

Albert Oliver

Ini merupakan hal yang penting karena itu kita perlu mendesak Pemda Kota Kupang untuk mengindahkan hal ini. Di DPRD Kota Kupang kami akan mengupayakan upaya ini (penyusunan SPKD dan penanggulangan kemiskinan) untuk menjadi prioritas.

Ray Fernandes

Lebih cepat lebih baik. PIAR bertugas untuk menyurati gubernur dan bupati.

Simson Jacob

Pada akhir Nopember kita berharap sudah ada titik terang tentang apa yang direncanakan. Tiga daerah sudah siap untuk sesegera mungkin melaksanakan *workshop* untuk kepentingan ini.

Lery Mboeik

November akan merupakan tahapan persiapan pembuatan dokumen SPKD bukan finalisasi SPKD. Apa yang terpenting adalah adanya kemauan atau komitmen bersama untuk menyusun SPKD.

Daniel Pobas

Perlu ada rekomendasi dari kegiatan ini yang diberikan kepada pemda provinsi maupun kabupaten atau kota.

Simson Jacob

- Sebenarnya kita dapat saja tidak terpaku pada rekomendasi karena ada empat aktor yang terlibat dalam kegiatan ini. Karena itu, legislatif dapat saja mengambil inisiatif untuk mengatakan kepada pemda bahwa penyusunan SPKD itu penting.
- Sepakat dimulai pada November.

Christian Pay – TTS

Saya pikir perlu penekanan dari SMERU dan Bappenas kepada pemerintah provinsi. Hal ini penting karena sebenarnya kita masih terpola dengan birokrasi yang terstruktur.

Simson Jacob

Jika ada *workshop*, apa semua teman-teman akan terlibat sepenuhnya dan mendukung kegiatan ini atau tidak?

Peserta

Setuju dilibatkan.

Remigius Halek

Sebenarnya semua sudah jelas. Saya yakin semua komponen akan mendukung. Kesulitan anggaran akan kita pikirkan bersama.

Ray Feranandes

Kalau kita sudah sepakat, mari kita lakukan. PIAR tetap lakukan penekanan atau negosiasi ke pemda untuk pelaksanaan berbagai kegiatan.

Maxi

Pakai otoritas gubernur untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di setiap daerah.

Marthen

Ada arogansi kota/kabupaten Kita serahkan ke SMERU dan KIKIS untuk melaksanakan kegiatan ini.

Simson Jacob

Hal-hal tersebut akan kita pikirkan yang penting teman-teman yang ada di daerah siap untuk menyukseskannya. Kalau begitu kita akan merumuskan kembali dengan baik dan menyampaikannya kepada teman-teman dan akan terus saling berkoordinasi dalam rangka pembagian peran dan persiapan-persiapan di daerah. Yang kita inginkan adalah masalah kemiskinan harus menjadi masalah bersama sehingga menjadi tanggung jawab bersama.

Kami mengucapkan terima kasih atas keseriusan teman-teman untuk mengambil bagian dalam kegiatan ini.

Lery Mboeik

Hasil dari kegiatan ini tentunya akan disampaikan ke pemda, dan nantinya SMERU akan menyampaikannya kepada gubernur tentang proses dan sedikit kesimpulan serta harapan yang diperoleh dari kegiatan ini.

Nuning Akhmadi (SMERU)

Kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatan teman-teman dalam kegiatan ini. Tentunya kami berharap agar kegiatan ini memberikan pemahaman yang sama tentang kemiskinan dan penanggulangannya. Kami juga mengharapkan *political will* (itikad politis) dari pemerintah, karena hal ini merupakan kunci penanggulangan kemiskinan.

Simson Jakob

Sebelum mengakhiri kegiatan ini, diharapkan teman-teman peserta dapat memberi masukan sebagai bahan evaluasi yang berkaitan dengan materi, proses, fasilitator serta proses ini secara keseluruhan termasuk masalah akomodasinya. Juga teman-teman dapat menyampaikan harapan ke depan. Untuk itu, kami beri kesempatan kepada teman-teman dan perwakilan dari eksekutif, legislatif dan NGO.

Ray Fernandes (Legislatif)

- Fasilitator telah membuat peserta menjadi lebih serius dan itu berarti bahwa strategi yang mau dibangun oleh fasilitator dalam rangka mencapai tujuan lokakarya ini telah berhasil.
- Kegiatan telah berjalan dengan baik, meskipun kemarin fasilitator telah membuat kami bingung memahami apa sebenarnya yang mau difasilitasi.
- Terima kasih kepada teman-teman yang telah melaksanakan kegiatan ini karena kegiatan ini memberi pencerahan tentang SPKD dan tentunya akan menjadi tugas lanjutan bagi kami untuk mensosialisasinya.

Ida (Eksekutif)

- Kami ingin mengkritik perilaku yang kami anggap kurang santun dari seseorang yang diduga fasilitator/panitia saat Gubernur NTT menyampaikan materinya. Hal ini mungkin dianggap sepele, tetapi menurut kami perlu mendapat perhatian.
- Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan ini karena pada saat ini eksekutif, legislatif dan LSM dapat duduk bersama membicarakan program penanggulangan kemiskinan.

Yupensia (NGO)

- Kesiapan panitia dirasa kurang memadai karena minimnya fasilitas media presentasi seperti *in-focus*. Hal ini berakibat pada kurang jelasnya materi yang disampaikan.
- Pembagian peran panitia juga belum maksimal.
- Konsumsinya sudah sangat baik.

Simson Jacob

- Kami menampung semua kritikan dan masukan dari teman-teman. Minimnya fasilitas untuk penyampaian materi memang di luar harapan kami. Karena hanya gubernurlah yang mengkonfirmasi untuk menggunakan *in-focus* dan beliau menjamin untuk membawanya sendiri. Akibatnya kami tidak menyiapkan *in-focus* lagi dan kami mohon maaf jika proses penyampaian materi cukup terganggu.
- Kami mengakui kurang maksimalnya dukungan panitia atas kegiatan ini akibat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada saat bersamaan dan hal ini menyedot perhatian beberapa anggota panitia lain.
- Kami juga mohon maaf atas keterlambatan beberapa sesi.

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam acara ini. Kami juga menitipkan ucapan terima kasih kepada pimpinan lembaga atau instansi yang telah mengirim wakilnya dalam kegiatan ini.

Lery Mboeik

Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan khususnya kepada Pak Simson yang telah berperan sebagai fasilitator selama kegiatan ini berlangsung. Atas nama panitia, saya memohon maaf atas berbagai kelemahan atau persoalan yang ditemui selama kegiatan ini. Saya berharap agar kelemahan yang ada merupakan kelemahan bersama untuk diperbaiki di masa depan. Atas nama PIAR, saya harapkan agar kerja sama kita tidak selesai di sini saja. Kami sangat berterima kasih jika bapak ibu menindaklanjuti apa yang menjadi hasil dari proses ini dan melibatkan semua teman-teman NGO yang ada di forum ini. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan saya berharap kita akan bertemu lagi dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. *Sayonara!*

LAMPIRAN

DAFTAR ALAMAT PESERTA LOKAKARYA
"Pengembangan Inisiatif Lokal Untuk Sistem Perencanaan
dan Anggaran Publik berdasarkan SPKD"
Hotel Maya Kupang, 14 - 16 Oktober 2004

No	Nama Peserta	Lembaga/Instansi	Alamat	Telp, Fax, E-mail
1	Immanuel Habel	LSM SARPEL	Jl. Melina, kel. Metim Kota Soru - kab. Rokondu	Telp.: 0380 871154. Fax: - E-mail: -
2	Wicky . B.	Rumoh Perempun Kupang	Uo. Babungwan No 17 wadikom Baru Kupang - NTT	Telp.: 0380 - 823117 Fax: - E-mail: p
3	Xupersia	Yayasau Tanpa Betas	Jl. P. Suprepto No. 41 Omboto - Kupang	Telp.: 0380 - 820140 Fax: 0380 - 820140 E-mail: -
4	BUIK JUSTINA	BAPPEDA BELU	Jl. EL TARI No.2 ATB.	Telp.: 0389 21209. Fax: 0389 21209. E-mail: -
5	Anna Tiwu.	DPRD BELU.	Jl. BAKUKI RAHMAT 6. ATB.	Telp.: 0389 21027. Fax: 0389 21027. E-mail: -
6	Nuriny Alchmadi	SIBERU JKT	J. Tulugayang 46, Mestey Jkt	Telp.: 021 - 31936 336 Fax: 021 - 31930 850 E-mail: nuriny@smenu.or.id
7	Hanifa. Z. Yoesoef	BPM k Kupang.	Jl. Jank No.5. Sepura kpg	Telp.: 0380 833180. Fax: - E-mail: -
8	JOHANNES GHEWA	INCREASE Kupang	Jln. Pendidikan II/15 Kupang	Telp.: 0380 826469 / HP 0815394109 Fax: 0380 826468 E-mail: johann@inze@yaho.com
9	DANIEL HUREK	DPRD Kota Kupang	Jln. Banteng Cq. II No. 2 RT/Rw. 24/09 Kelurahan RANONA	Telp.: 0380 8080191 / 081533 Fax: - E-mail: 5949963

10	SATWAL A. POBAS	BETDA. TTS	Jln. Piliit No. 4. Kel. Pobe Komus	Telp.: 0388 2233 (16) Fax: 0388 2609 (K) E-mail:
11	CHARISAL M.A MANU	BPS. ALOR	JUN. A. YANI 5. KALABAHU-ALOR. (0386) 21886 - Puncak	Telp.: 0386 (21096) Fax: 0386 (21096) E-mail: KAMPAR
12	MESACH R. BAILAEX	BPM KOTA KUPANG	Jl. PERUNTIS KEMERDEKAAN KOTA EARLY - KUPANG	Telp.: 0386 - 822.035 Fax: E-mail:
13	John. B. Padoh.	WVI / ADP - ROTE	Jln. LEKUNIK, BA'A - ROTE	Telp.: 0380 - 871149 Fax: - E-mail: -
14	Frans Nuniks	LKSH PENA NTT	Jl. RANTAI DAMAI I GESUFO KOTA KUPANG	Telp.: 8000604 (0380) Fax: E-mail:
15	Olivier Alkanta.	DPRD. Kota Kupang	KEL FATULU RT16 RAS V KOTA Kupang	Telp.: 081339489828 - Fax: 0386 (820055) - E-mail:
16	JACKY. S.	INCREASE	DL. PERHIMPUNAN II/IS WTLU KOTA	Telp.: 0380. 826468 Fax: 0380 826468 E-mail:
17	Ray Fernandez	DPRD TTU	Jln. Bosuli Rahmè	Telp.: Hp. 085239005004 Fax: E-mail:
18	CHRISTIAN JULIUS PARY	DPRD KAO. TTS	RUMAH: JLN KANGUEN NO. 9. KTR JLN BOSUKI RAHMAT	Telp.: 0388 (21508) Fax: Hp 081339471070 E-mail:
19	Maxi Tamesis	Bappeln TTU	Jln. Sempasi - Icafaeman	Telp.: 0380-31114 Fax: E-mail: HP: 081339420203.
20	BONIFACIUS E.S. ASA	BPM D - Kab BELU	Jl. ELTARI NO 1.	Telp.: 0389 21353 Fax: E-mail: 081339415704
21	BUS AND HAPPO KORO	District Prop NTT	Jln polinimilita NO 449.	Telp.: Fax: E-mail: 832 836 / 833 214